WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010–2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010 dan Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2005–2025;

26. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010–2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
10. Perencanaan adalah Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode terhitung sejak 2010-2015.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah Rumusan mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
15. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA – SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana SKPD adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini diatur gambaran umum kondisi Daerah, gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Penetapan Indikator Kinerja Daerah, Pedoman Transisi dan Kaidah dan Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 – 2015

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Paraturan Daerah ini adalah adanya Dokumen Perencanaan yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Pembangunan dan menjadi tolok ukur keberhasilan serta acuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kondisi masa depan Kota Tidore Kepulauan, untuk memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Tidore Kepulauan.
2. Mendukung Koordinasi antar pelaku Pembangunan di Kota Tidore Kepulauan.
3. Menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas baik antar Instansi Daerah maupun fungsi Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Kota Tidore Kepulauan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Menjamin koneksitas RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

BAB IV
POKOK-POKOK RPJMD

Pasal 4

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2010–2015 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

(2) Rincian dari Program Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan melaksanakan RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 6

Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Walikota Tidore Kepulauan melalui BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui BAPPEDA melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2010–2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 19 Mei 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 19 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR 110.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19660110 199211 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2010-2015

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2015 dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR 89.

PEMERINTAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011-2015

DAFTAR ISI

BAB. I. PENDAHULUAN		**I - 1**
1.1	Latar Belakang …….……	I - 1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan ……..	I - 2
1.3	Hubungan Antar Dokumen ……..	I - 3
1.4	Sistematika Penulisan ……	I - 4
1.5	Maksud dan Tujuan ……..	I - 5
BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		**II - 1**
2.1	Aspek Geografis dan Demografis ……..	II - 1
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat ……	II - 3
2.3	Aspek Pelayanan Umum …….	II - 13
2.4	Aspek Daya Saing Daerah ……..	II - 16
BAB. III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**III - 1**
3.1	Arah Pengelolaan APBD ……...	III - 2
3.2	Arah Kebijakan APBD dan Dana Masyarakat/Mitra	III - 15
3.3	Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	III - 21
BAB. IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS		**IV - 1**
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV - 1
4.2	Isu Strategis	IV - 5
BAB. V. PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		**V - 1**
5.1	Visi	V - 1
5.2	Misi	V - 2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V - 3
BAB. VI. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN		**VI - 1**
6.1	Strategi Pembangunan Pemerintahan	VI - 1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	VI - 5
BAB. VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		**VII - 1**
7.1	Kebijakan Umum	VII - 1
7.2	Program Prioritas	VII - 2
7.3	Program Pembangunan Daerah	VII - 4

BAB. VIII. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH **VIII - 1**

8.1 Indikator Kinerja ..... VIII - 1

BAB. IX. PENUTUP **IX - 1**

9.1 Pedoman Transisi ..... IX - 1

9.2 Pedoman Pelaksanaan ..... IX - 1

9.3 Pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD ..... IX - 1

9.4 Pedoman dalam penyusunan RKPD ..... IX - 1

9.5 Peran Stakeholders ..... IX – 2

MATRIKS RPJMD KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010 - 2015

KATA PENGANTAR

Agar pembangunan di Kota Tidore Kepulauan dapat terlaksana dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan visi Kota 2011-2015, yaitu "Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan Yang Religius, Maju, Adil, dan Sejahtera, maka diperlukan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program-program pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dimaksud harus memiliki batasan waktu tertentu, dalam hal ini mencakup periode antara tahun 2011 sampai tahun 2015 (lima tahun). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan program kerja eksekutif pemerintah daerah yang akan disahkan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang digunakan sebagai acuan oleh kepala daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah daerah dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat Kota Tidore Kepulauan, lahir dan batin.

Tidore , Pebruari 2011
Kota Tidore Kepulauan

Drs. Achmad Mahifa

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010-2015.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan adalah kegiatan yang berkesinambungan *(suistanable governmental activity),* Sebagai sebuah proses kesepakatan antara masyarakat, dalam menata pembangunan masyarakat untuk menciptakan suatu suasana yang tertib, sebagai jawaban suasana tidak tertib *(inorder society)* pada masa sebelumnya, maka pada saat itulah kegiatan pemerintahan telah berlangsung. Kegiatan pemerintahan dimaksud, berlangsung secara evaluatif, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadaan. Pemangku jabatan pemerintahan yang pada dasarnya memiliki periodisasi masa jabatan, namun esensi kegiatan pemerintahan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat *(public service)* terus-menerus terlaksana. Adanya periodisasi kegiatan pemerintahan pada intinya dimaksudkan untuk memberikan batasan jangka waktu pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Periodisasi kegiatan pemerintahan masa kini adalah lanjutan masa sebelumnya dan dasar bagi kegiatan pemerintahan pada masa mendatang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Setiap daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2010-2015, merupakan perwujudan dari pembangunan nasional yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan Kota Tidore

Kepulauan, dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan Provinsi, dengan dinamika pembangunan yang berkembang saat ini serta janji-janji Walikota dan Wakil Walikota dalam proses Pemilihan Kepala daerah (PILKADA), sehingga implementasi dari visi, misi dan program, merupakan gambaran dari kehendak masyarakat Kota Tidore Kepulauan di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2010-2015 yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2010-2015 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan RPJM Provinsi Maluku Utara dan RPJM Nasional. Di samping itu, dalam penyusunan RPJM Kota Tidore Kepulauan 2010-2015 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengingat peran dan fungsi RPJM Kota Tidore Kepulauan sangat penting bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJM Kota Tidore Kepulauan dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Muatan dalam RPJM Kota Tidore Kepulauan 2010-2015 berisi tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, strategis dan arah kebijakan, kebijakan umum dan Program pembangunan daerah. Pada lima tahun ke depan, penanganan isu-isu strategis dimaksud sangat relevan dengan isu-isu aktual di daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang harus diwujudkan hingga 2015 yaitu: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan (2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Menurunkan angka kematian anak, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain, (6) Menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

1.2 Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Tidore Kepulauan 2010-2015 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kota Tidore Kepulauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, dan Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
15. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJP Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD Kota Tidore Kepulauan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. RPJMD Kota Tidore Kepulauan merupakan sub sistem dari RPJM Nasional yang memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini RPJMD Maluku Utara telah mengacu pada RPJM Nasional, sehingga kaitan yang lebih spesifik adalah antara RPJMD Kota Tidore Kepulauan terhadap RPJMD Propinsi Maluku Utara. Adapun pokok yang berkaitan antara RPJMD Propinsi dan Kota Tidore terutama terletak pada isu-isu strategis, kebijakan umum dan penetapan indikator kinerja. Penyusunan dokumen RPJMD didasarkan pada enam pendekatan yang dijabarkan pada bagian berikut:

1.3.1 Politik

Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan walikota dan wakil walikota adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan walikota dan wakil walikota saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3.2 Teknokratik

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu. Dengan mengacu kepada RPJP Kota Tidore Kepulauan, RPJP Provinsi Maluku Utara dan RPJP Nasional.

1.3.3 Partisipatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

1.3.4 Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up)

Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/Kota, kecamatan, dan kelurahan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2015 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan. Penyusunan RPJM Kota Tidore Kepulauan 2010-2015 akan dilaksanakan melalui berbagai tahapan yang melibatkan berbagai *stakeholder* baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB.I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunana
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografis dan Demografis
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB. III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Pengelolaan APBD
- 3.2 Arah Kebijakan APBD dan Dana Masyarakat/Mitra
- 3.3 Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB. IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1 Permasalahan pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB. V PENYAJIAN VISI, MIS, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB. VI STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB. VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB. IX PENUTUP

MATRIKS RPJMD KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2005 - 2015

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Menyediakan dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan menjadi tolok ukur keberhasilan serta acuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

1.5.2 Tujuan

1. Menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kondisi masa depan Kota Tidore Kepulauan, untuk memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Tidore Kepulauan.
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kota Tidore Kepulauan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar instansi daerah, maupun fungsi pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Tidore Kepulauan.
5. Menjamin tercapaianya pengunaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1 Aspek Geografis

Kepulauan Tidore sebelumnya merupakan Ibukota Halmahera Tengah, seiring dengan reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, pada tahun 2003 dibentuk Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003, dengan luas wilayah 13.862,86 $km^{2,}$ dengan luas laut 4.746 dan luas daratan 9.116, 36 km^2, yang terletak pada batas astronomis 0°-20° Lintang Utara hingga 0°-50° Lintang Selatan dan pada posisi 127°-127^o45' Bujur Timur. Kota Tidore Kepulauan berbatasan dengan Halmahera Barat; sebelah Selatan dengan Halmahera Selatan; di sebelah timur dengan Halmahera Timur dan Halmahera Tengah; serta di sebelah barat dengan Kota Ternate. Kota ini memiliki ciri daerah kepulauan dimana wilayahnya tersebar di beberapa pulau yaitu; pulau Tidore, pulau Halmahera, pulau Failonga, pulau Mare, pulau Maitara, pulau Woda, pulau Raja, pulau Joji, pulau Guratu, pulau Tamong, pulau Tawang dan pulau Sibu, dari 12 pulau, ada 4 (empat) pulau yang berpenghuni yaitu; pulau Tidore, pulau Halmahera, pulau Mare dan Maitara.

Iklim yang terdapat di wilayah Kota Tidore Kepulauan ini seperti umumnya daerah kepulauan beriklim tropis, dimana iklimnya sangat dipengaruhi oleh angin laut, curah hujan rata-rata kurang dari 2000 mm. Musim kemarau terjadi pada bulan Desember sampai Maret, sedangkan musim hujan pada bulan Mei sampai dengan Oktober yang disebabkan oleh angin musim tenggara. Musim pancaroba terjadi pada bulan April dan Desember. Secara administrasi kota Tidore Kepulauan memiliki 8 kecamatan dengan luas masing-masing kecamatan adalah sebagai beriku; Tidore 212,13 km^2, Tidore Selatan 249,32 km^2, Tidore Utara 221,33 km^2, Tidore Timur 199 km^2, Oba 2.373,63 km^2, Oba Selatan 2.210,92 km^2, Oba Utara 1.155,91 km^2 dan Oba Tengah 2.493,17 km^2.

2.1.2 Demografis

Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan, tahun 2005 jumlah 85.669, tahun 2006 menjadi 87.656, tahun 2007 meningkat menjadi 90.584, pada tahun 2008 meningkat menjadi 91.930 jiwa dan pada tahun 2009 menjadi 94.036, dari rata-rata pertumbuhan 2,38 %, maka 5 tahun ke depan dari 2010 hingga tahun 2015, jumlah penduduk kota Tidore Kepulauan dapat diistimasi yaitu; 96.276 pada tahun 2010, 98.570 pada tahun 2011, tahun 2012 meningkat menjadi 100.918, tahun 2013 meningkat menjadi 103.323, tahun 2014 akan meningkat menjadi 105.785 dan pada tahun 2015 akan menjadi 108.305 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak terletak di Pulau Tidore yang pada tahun 2009 yang mencapai 61,055 jiwa atau 65 % sementara di Oba (daratan Halmahera) hanya 35 % dari total jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan.

Dari jumlah penduduk pada tahun 2009 sebesar 94.036 jiwa, 91% telah memiliki Kartu Penduduk atau sebanyak 85.572 jiwa dan yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 62.016 jiwa perseribu atau 65,95%. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Tidore Kepulauan di dominasi oleh migrasi penduduk antar daerah yang datang ke wilayah ini, terutama dari wilayah Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Jadi pertumbuhan penduduk lebih disebabkan oleh faktor migrasi, bila dibanding pertambahan secara alami (*natural increase*). Seiring dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan tingkat kesejateran yang semakin baik, maka angka kematian kasar cenderung menurun, pada tahun 2008 angka kematian kasar di Kota Tidore Kepulauan adalah 0,37% atau 338 persatuan penduduk, tahun 2009 adalah 0.33% atau 310 penduduk dan pada tahun 2010 menurun menjadi 0.30% atau 289 jiwa, sehingga diharapkan pada tahun 2011 menjadi 0.26% atau 256 jiwa dan pada tahun 2012 menjadi 0.23% atau 232 jiwa, yang selanjutnya, angka kematian kasar pada tiga tahun berikutnya dapat diistimasi yakni; 2013 0.20% atau 207 jiwa, 2014 0.18% atau 190 jiwa dan diharapkan pada tahun 2015 akan menjadi 0.15% atau 162 jiwa.. Untuk itu upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pembangunan di Kota Tidore Kepulauan adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk terutama di desa-desa yang masih rendah tingkat kesejahteraan untuk mendorong kehidupan yang lebih layak agar tingkat kematian penduduk dapat ditekan.

Dalam jangka menengah berpotensi terjadi ledakan penduduk utamanya dipengaruhi oleh migrasi aparat pemerintah provinsi dan meningkatnya aktivitas ekonomi, yang diakibatkan dari pemindahan definitif Ibukota Provinsi ke Kota Tidore Kepulauan, sehingga kecenderungan laju pertumbuhan penduduk yang akan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Laju pertumbuhan yang berarti ini berpotensi memunculkan permasalahan baru, baik dari aspek permintaan terhadap kebutuhan ruang, pelayanan publik, dan permasalahan lain yang mengikutinya, sehingga perlu perencanaan penanggulangan ledakan penduduk dari tumbuhnya pusat-pusat perekonomian baru. Jumlah penduduk di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1: Jumlah Penduduk Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 dan 2009

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	Tidore	10.299	10.966	21.265
2	Tidore Selatan	7.698	7.729	15.427
3	Tidore Utara	8.215	8.340	16.555
4	Tidore Timur	3.910	3.898	7.808
5	Oba	5.095	5.206	10.301
6	Oba Selatan	2.519	2.604	5.124
7	Oba Utara	5.492	5.479	10.971
8	Oba Tengah	3.225	3.360	6.585
Jumlah 2009		46.453	47.582	94.036
Jumlah 2008		45.413	44.517	91.930

Sumber: Registrasi Penduduk Akhir Tahun dan Susenas 2009 (diolah)

Jumlah angkatan kerja menunjukan bahwa tahun 2008, dari jumlah angkatan kerja penduduk Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari 36,132 jiwa, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 34,188 jiwa dan 1,944 jiwa tergolong pengangguran terbuka. Total penduduk bukan angkatan kerja sebesar 20,501 jiwa dengan 7,399 jiwa bersekolah, 10,236 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya 2,866 jiwa tergolong pada kegiatan lainnya, dengan presentasi 94,62 bekerja terhadap angkatan kerja, 5,38 tingkat pengangguran 5,38, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 63,89 %.

2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

A. Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam evaluasi pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan adalah pendidikan, hingga tahun 2010 jumlah Tingkat Kanak-Kanak (TK) sebanyak 55 unit yang terdiri dari 2 TK negeri dan 53 TK swasta, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 98 yang terdiri dari 97 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 33 sekolah yang terdiri dari 25 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta, sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Tidore untuk SMA berjumlah 18 sekolah yang terdiri dari 10 SMA negeri dan 8 SMA swasta, sedangkan jumlah SMK di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 7 sekolah yang terdiri dari 5 SMK negeri dan 2 SMK swasta.

Kota Tidore Kepulauan memiliki 2 perguruan tinggi yaitu Universitas Nuku dan STMIK Tidore Mandiri. Jumlah guru yang ada di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 2.350 orang yang terdiri dari 268 orang guru TK, 1174 orang guru SD, 445 orang guru SMP, 333 orang guru SMA dan 130 orang guru SMK. Jumlah Madrasyah Ibtidayah 12 sekolah yang terdiri dari 6 sekolah negeri dan 6 swasta dengan jumlah guru 175 orang pada tahun 2009, jumlah Madrasyah Tsanawiyah 11 sekolah yang terdiri dari 3 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta dengan jumlah guru 230, sedangkan Madrsyah Aliyah sebanyak 6 sekolah yang terdiri dari 1 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta dengan jumlah guru 132.

Hasil input evaluasi pembagunan pendidikan yang bersumber dari Dinas pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan tahun 2010, dari tahun 2005-2010 menunjukan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kota Tidore Kepulauan pada dua tahun terakhir menunjukan peningkatan dari kelompok usia 7-18 jenjang pendidikan SD s/d SMA/SMK pada tahun 2009 penduduk usia sekolah adalah 25.129 dan jumlah siswa SD dari SD s/d SMA/SMK adalah 20.546, dimana APS pada tahun 2009 adalah 81.76%. Jumlah penduduk usia sekolah sebesar 24.397, dan jumlah siswa usia sekolah adalah 20.348, dengan presentasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) 83.40% meningkat dari tahun sebelumnya.

Secara umum terlihat bahwa APM di kota Tidore Kepulauan pada usia sekolah 7-12 tahun pada tahun 2009 sebesar 12.162 jiwa dimana jumlah siswa usia sekolah sebanyak 11.320. Sedangkan pada tahun 2010 usia sekolah 7-12 tahun sebanyak 12.682 dan jumlah siswa usia sekolah sebesar 11.868, sehingga presentasi APM untuk kelompok usia 7-12 tahun 2009 adalah 93.08% dan pada tahun 2010 tidak terjadi peningkatan yaitu 93.08% sama seperti tahun sebelumnya. Untuk kelompok usia 13-15 tahun 2009 penduduk usia sekolah 7.230 dengan jumlah siswa 5.203, pada tahun 2010 sebanyak 6.030 dengan jumlah siswa 4.245 siswa, presentasi APM pada kelompok usia 13-15 adalah 71.96% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 menurun menjadi 70.40 %. Sedangkan pada kelompok usia 16-18 pada jenjang pendidikan SMA/SMK, tahun 2009 jumlah penduduk usia sekolah adalah 5.737 dengan jumlah siswa adalah 4.023, sementara tahun 2010 kelompok usia sekolah adalah 5.685 dengan jumlah siswa 4.235, sehingga presentasi APS pada kelompok usia 16-18 pada tahun 2009 adalah 70.12% dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 74.49%.

Untuk data relevansi pendidikan tahun 2009, jumlah siswa di Kota Tidore Kepulauan adalah SD 11.569 orang, SMP 4.322 orang, SMA 3.001 orang dan SMK 670 orang, pada tahun 2010 meningkat menjadi SD 11.866 orang, SMP 4.345 orang, SMA 3002 orang dan SMK 731 orang. Dari segi input, total tingkat kelulusan juga menujukan peningkatan pada tahun 2010 khususnya pada tingkat SD dan SMP, yaitu SD 100% sama dengan pada tahun 2009 dan SMP 77,45 % di tahun 2010 dan 93,3 % pada tahun 2010. Sedangkan tingkat kelulusan pada SMA/SMK mengalami penurunan dimana tingkat kelulusan di SMA tahun 2009 dari 89.83% menurun menjadi 77,37% di tahun 2010 dan pada SMK di tahun 2009 100% menurun menjadi 6.16 %. Hingga tahun 2008 angka putus sekolah pada usia 15 adalah 3, 19 dan dan rata-rata lama sekolah 8,27 di tahun 2008 meningkat menjadi 8,6 di tahun 2009.

B. Kesehatan

Perubahan derajat kesehatan masyarakat antara lain didukung oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta variabel primer lainnya seperti ketersediaan tenaga medis dan paramedis, manajemen, kualitas pelayanan, dan kesadaran masyarakat serta aspek lain yang bersifat sebagai penunjang terhadap kesehatan.

Indikator utama dalam tingkat kesehatan masyarakat adalah peningkatan umur harapan hidup. Pada tahun 2008 tingkat harapan hidup di Kota Tidore Kepulauan 64,5 tahun dan tahun 2008 meningkat menjadi 64,9 tahun. Adanya tingkat harapan hidup yang semakin baik, mengindikasikan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Meskipun demikian indikator status kesehatan lainnya seperti angka kematian bayi, balita dan ibu masih memprihatinkan. Kondisi ini tercermin dengan masih tingginya angka kematian bayi sebesar 24% perseribu kelahiran hidup pada tahun 2007 jika dibandingkan dengan tahun 2008 mengalami penurunan 4% menjadi 20% perseribu kelahiran hidup. Sesuai dengan data dari badan pusat statistik, jumlah angka kematian bayi adalah 22 bayi dari total 541 kelahiran bayi di tahun 2009, menurun dari 24 kematian bayi di tahun 2008. Selanjutnya angka kematian Ibu pun masih tinggi yaitu 4.44 perseratus ribu kelahiran. Kondisi kesehatan masyarakat diperburuk lagi dengan adanya disparitas yang relatif melebar antar wilayah, tingkat sosial, ekonomi, dan gender. Kondisi ini tercermin dengan tingginya penyakit malaria, Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), diare dan penyakit menular lainnya yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan kondisi tersebut, maka hingga tahun 2009, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Tidore Kepulauan berjumlah 74 buah yang terdiri dari 1 Rumah Sakit, 7 puskesmas, 29 pustu dan 38 polindes, dengan tenaga medis terdiri dari 16 orang dokter, 51 orang bidan, 58 perawat dan 63 panja kesehatan. Jumlah penderita penyakit di tahun 2009 masih relative tinggi, yaitu TBC 336 penderita, Malaria 2.357, Influenza dan Infeksi Saluran Pernapasan 21.878, diare 2.110, penyakit kulit 4.245, penyakit mata 886, penyakit telinga 705, dan penyakit cacingan sebesar 191 penderita. Baiknya pelaksanaan program kesehatan dapat juga dilihat dari tingginya jumlah peserta KB, total peserta KB tahun 2008 adalah 1.308 meningkat menjadi 2.244 di tahun 2009.

C. Kehidupan Beragama

Untuk kehidupan beragama di Kota Tidore Kepulauan relatif baik, ini ditandai dengan banyaknya rumah ibadah yang ada, hingga tahun 2010 Kota Tidore Kepulauan memiliki 256 tempat ibadah yang terdiri dari 140 masjid, 92 mushalah dan 24 gereja, hingga tahun 2009 Jumlah TPA di Kota Tidore Kepulauan tercatat 150 dengan jumlah

murid 6.280 orang. Untuk jumlah pemeluk agama di Kota Tidore Kepulauan hingga tahun 2010 adalah 114,695, yang terdiri dari 101,330 Islam, 6,681 Protestan, 6,681 Katolik dan 6 orang pemeluk agama Hindu.

Dari data menunjukan bahwa rasio pemeluk agama terhadap kebutuhan rumah ibadah sebesar 724 orang/Mesjid untuk pemeluk agama Islam dan 557 orang/gereja untuk pemeluk agama Kristen, dari rasio kebutuha rumah ibadah tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan beribadah bagi pemeluk agama di Kota Tidore Kepulauan, disisi lain penyediaan infrastruktur rumah ibadah, lebih dipengaruhi oleh dana partisipasi masyarakat, sehingga tidak membebani keuangan daerah dalam penyediaan fasilitas peribadatan di Kota Tidore Kepulauan.

2.2. 2 Perekonomian Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), korelasi PDRB dan PAD, dapat dicapai jika kebijakan ekonomi dapat memberikan efek bagi tumbuhnya investasi di Kota Tidore kepulauan, yang dapat memberikan efek berantai bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemulihan dan penguatan struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah, yang berimplikasi langsung pada kebutuhan dan peningkatan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan rata-rata pertahun mengalami peningkatan sebesar 05%, pada akhir tahun 2010 mencapai 5,13 %. Laju pertumbuhan yang positif dipengaruhi oleh konsumsi yang mendominasi laju pertumbuhan ekonomi, sehingga struktur perekonomian yang ditopang oleh sektor pertanian, cenderung mengalami penurunan, sehingga perekonomian Kota Tidore Kepulauan dengan laju pertumbuhan yang positif belum mampu menciptakan pemerataan pembangunan, kondisi ini belum menunjukan kualitas laju pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif yang menganggur, dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan.

Dorongan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, dipengaruhi oleh tingginya tingkat inflasi yang rata-rata pertahuan mencapai 2 digit, walaupun pada periode tahun 2010 tingkat inflasi sebesar 9,44 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 122,19, belum memberikan implikasi positif bagi peningkatan daya beli masyarakat, sehingga PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku di Kota Tidore Kepulauan cenderung mengalami peningkatan, namun belum menunjukan perbaikan pada pergeseran penduduk miskin dari garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Kualita pembangunan ekonomi yang baik tidak sekedar ditunjukan oleh tingginya laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga dapat berimplikasi pada pemerataan dan distribusi ekonomi pada berbagai level masyarakat, dalam upaya menciptaka pembanguna ekonomi yang seimbang dibutuhka kebijakan ekonomi yang dapat memberika ruang bagi pelaku ekonomi utamanya KUKM, yang berbasis pertanian, oleh karena fundamental ekonomi Kota Tidore Kepulauan ditopang oleh sektor pertanian yang mencapai 36,78%, yang juga menopang aktivitas ekonomi masyarakat yang mencapai 43,25% dari penduduk Kota Tidore Kepulauan.

B. Kondisi Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahaan, dituntut merumuskan model penganggaran yang menganut prinsi-prinsip *value for money*, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, sehingga membutuhkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam 5 tahun pelaksanaan pembangunan masih dirasakan terdapat ketimpangan alokasi anggaran, baik dari aspek aparatur dan masyarakat, maupun ketimpangan alokasi antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku ekonomi, sehingga pengeluaran pemerintah yang diharapkan menjadi pengerak bagi peningkatan kualitas pembangunan ekonomi belum menunjukan kemajuan yang signifikan, walaupun disaat yang sama data menunjukan pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif, namun dari aspek pemerataan belum menunjukan keseimbangan ekonomi.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam 5 tahun pembangunan Kota Tidore Kepulauan (2005-2010), masih didominasi dana perimbangan, dengan konstribusi mencapai 90%, sedangkan PAD yang diharapkan menjadi instrument bagi kualitas

pembangunan otonomi daerah masih sangat rendah. Hasil kajian Departemen Keuangan Republik Indonesia, tentang pemetaan kapasitas fiskal daerah di Indonesia, menempatkan Kota Tidore Kepulauan dengan nilai 2,7465 yang tergolong sangat tinggi, menunjukan bahwa kapasitas fiskal daerah yang baik, namun data APBD berdasarkan alokasi anggaran dalam 5 tahun terakhir menunjukan ketimpangan alokasi, dimana beban belanja Tidak langsung lebih besar dari belanja langsung, pada tahun 2009 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menganggarkan belanja daerah sebesar Rp. 367.5 milyar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan perhitungan total belanja tidak langsung adalah Rp. 171,213,274,593 dan belanja langsung sebesar Rp. 157,582,940,726.

Rincian pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah Rp. 8,379,000,000, Dana Perimbangan Rp. 309,286,971,000 dan Pendapatan lain-lain yang sah berjumlah Rp. 2,300,000,000. Dari data di atas menunjukan terdapat perbedaan penyajian data analisisi sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang atas kajian Departemen Keuangan melalui PMK Nomor 245/PMK.7/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, sehingga informasi perencanaan anggara nasional tidak berdampak pada penurunan kualitas alokasi pembangunan Kota Tidore Kepulauan, yang masih membutuhkan peran investasi pemerintah dalam mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran yang relative tinggi.

C. Perdagangan dan Investasi

Investasi perdefenisi dapat diartikan sebagai semua pengeluaran yang bertujuan meningkatkan stok barang modal (capital stock). Yang dimaksud stok barang adalah jumlah barang modal yang tersedia dalam suatu perekenomian selama satu periode waktu tertentu. Dengan tujuan mempermudah analisis, maka dalam kajian infestasi ini stok barang modal dinilai dengan uang. Yang termasuk ke dalam barang investasi barang modal (*capital goods*) dan bangunan (*construction*) adalah pengeluaran untuk pembelian pabik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan produksi dan bangunan atau gedung yang baru, karena daya tahan dari barang modal dan bangunan umumnya lebih dari satu tahun, maka seringkali investasi ini disebut investasi bentuk harta tetap (*fixed investment*).

Dari data perkembangan investasi di Kota Tidore kepulauan periode 2004-2008 tergolong cukup besar. Total investasi yang besar hanya Rp. 35.827.854.800 pada tahun 2004, selanjutnya meningkat menjadi 220.662.552.484 pada tahun 2008 atau tumbuh sebesar 66,59 per tahun. Investasi sektor swasta yang dapat diperoleh datanya dalam kajian ini hanya investasi yang bersumber dari kegiatan sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa dan koperasi. Jadi nilai tersebut sungguhnya belum mencerminkan perkembangan investasi yang sesungguhnya. Upaya untuk mengungkap perkembangan investasi di semua kegiatan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan sudah dilakukan, akan tetapi data untuk itu sulit diperoleh.

Sektor swasta dan pemerintah sesungguhnya memiliki peranan yang sama penting dalam mendorong pembangunan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk kasus di Kota Tidore Kepulauan, peranan dari kedua sektor dapat dilihat dari sumbangsih masing-masing sektor dalam total investasi yang direalisasikan. Kekurangan investasi disektor pemerintah ditutupi oleh investasi sektor swasta, sehingga Nampak rasio antara kedua jenis investasi tersebut bervariasi, namun dengan kecederungan yang meningkat. Kalau pada tahun 2004, 2005 dan tahun 2008, investasi sektor swasta mendominasi total investasi di Kota Tidore Kepulauan dengan kontribusi masing-masing sebesar 86,92%, 56,55% dan 54,62%, maka tahun 2006 dan 2007, investasi sektor pemerintah mendominasi pembentukan investasi di kota ini dengan kontribusi masing-masing 66,10% dan 65,17%.

Pembangunan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan diarahkan dengan mendorong peran sektor swasta agar lebih mendominan dalam menggerakkan kegiatan produksi diberbagai sektor ekonomi. Peran ini terlihat dari rasio total investasi sektor swasta pada tahun 2008 lebih besar 1,20 kali dari investasi sektor pemerintah. Kondisi ini memberikan gambaran semakin meningkatnya peranan sektor swasta dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah ini. Peningkatan dalam investasi sektor swasta dan menurunya investasi pemerintah, dengan demikian sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dimana peningkatan investasi sedapat mungkin diarahkan untuk mendorong tumbuhnya investasi swasta melalui perkembangan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan prosedur perijinan investasi termasuk bagi usaha kecil dan menengah (UKM), menciptkan kepastian

hukum dan keamanan yang menjamin kepastian berusaha, mengurangi tumpang tindih kebijakan dan peraturan yang berada di hirarki di atasnya, serta menciptkan insentif investasi yang tepat sasaran dalam bentuk penyediaan infrastruktur pendukungya.

D. Industri

Sesuai dengan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan tahun 2010, pada tahun 2009 jumlah unit usaha industri kecil dan menengah yang terdaftar di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 746 usaha, dengan pertumbuhan 443 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,497 dan pertumbuhan sebesar 1.103. Sedangkan rata-rata tenaga kerja pada setiap unit usaha berkisar antara 2 dan 7 tenaga kerja. Dari nilai investasi dapat dilihat cabang industri yang paling tinggi nilai investasinya adalah jenis kayu, kimia dan bahan bangunan merupakan jenis industri yang menyerap investasi tersebar yaitu Rp 30,34 milyar, sedangkan industri kerajinan barang dan seni menyerap investasi terkecil hanya sebesar Rp. 209.79 juta.

Berdasarkan, nilai investasi di kecamatan, yang tertinggi terjadi di kecamatan Tidore Selatan yakni sebesar 27,7 milyar rupiah dan terendah terjadi di kecamatan Obat Selatan yang hanya menyerap investasi sebesar 98 juta Rupiah. Dari total nilai investasi Rp. 33,572,987 pada tahun 2009, dengan nilai produksi adalah Rp. 26,795,051,198 dan untuk total bahan baku sebesar Rp. 55,912,450,108.45.

Jumlah pelangan Perusahan Daerah Air Minum di kota tidore kepulauan hingga tahun 2009 tercatat 2.326 pelangan, dengan jumlah air yang terjual mengalami peningkatan 322.544 m^3, meningkat dari pemakaian 2008 yang hanya 222.350 m^3 Sedangkan untuk pelanggan pelanggan PLN tahun 2009 16.415 naik dari 16.057 di tahun 2008.

2.2.3 Potensi Daerah

A. Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Potensi tanaman pangan di Kota Tidore Kepulauan adalah padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah dan ubi-ubian lainnya. Pada tahun 2009, ubi kayu memiliki luas tanam paling besar yakni 544.8 Ha yang diikuti oleh tanaman jagung seluas 198 Ha dan kacang-kacangan sebesar 131.8 Ha. Sedangkan padi, ubi-ubian lainnya dan kacang hijau memiliki luas tanam yang tidak terlalu signifikan. Dari total lahan pertanian Kota

Tidore Kepulauan sebesar 981.8 Ha yang tersebar di 8 kecamatan, Tidore Utara memiliki lahan pertanian terbesar yakni seluas 31 %, kemudian kecamatan Oba seluas 24 %, sedangkan sisanya 45 % tersebar di 6 kecamatan yang lain. Produksi pertanian di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2009 sebesar 2.101.38 ton yang didominasi oleh produksi ubi kayu menduduki peringkat teratas dengan total 936.2 ton dan produksi terendah kacang hijau yang hanya sebesar 3.08 Ton.

B. Perkebunan

Potensi tanaman perkebunan di Kota Tidore Kepulauan sangat menjanjikan. Hal ini dilihat dari luas tanaman perkebunan yakni sebesar 24,076 Ha, yang terdiri dari luas tanaman (Ha) yang belum menghasilkan adalah 5,637 Ha, tanaman menghasilkan 16,430 Ha, dan tanaman yang tidak menghasilkan 2,009 Ha dengan total produksi pada tahun 2009 adalah 20,573. Sektor ini menyerap tenaga kerja kurang lebih 31, 833 KK di tahun 2009, jumlah tenaga kerja yang paling tinggi adalah pada jenis tanaman pala yang berjumlah 9,704 Petani, dan terendah pada tanaman fanili yang hanya budidayakan oleh 26 petani. Jenis tanaman perkebunan berdasarkan produksi tanaman kelapa tertingi yaitu 15,034 Ton dan fanili 0,62 Ton.

C. Perikanan

Produksi perikanan tangkap tahun 2008 berjumlah 12,149.69 ton, dan pada tahun 2009 jumlah produksi perikanan tangkap menurun menjadi 7,808.71 ton, jenis ikan yang paling banyak ditangkap berdasarkan data pada dinas perikanan dan kelautan Kota Tidore Kepulauan tahun 2010, ikan cakalang dengan produksi sebesar Rp. 16,923,000,000, diikut tuna sebesar Rp. 4,725,000,000 dan tongkol Rp. 2,390,000,000 ton.

Kegiatan penangkapan ikan di kota ini didukung oleh fasilitas perahu penangkapan berjumlah 1.132 pada tahun 2008 dan menurun menjadi 1,102, yang terdiri dari jumlah perahu tanpa motor 387 unit pada tahun 2008 dan 347 unit pada tahun 2009, motor tempel 1-10 pk 583 unit tahun 2008 naik menjadi 588 unit pada 2009, sedangkan motor tempel 40-120 pk pada tahun 2008 berjumlah 87 unit dan tahun 2009 menjadi 87, untuk perahu kapal tahun 2008 adalah 77 dan pada tahun 2009

menjadi 85 unit kapal, dengan demikian dari data yang ada menunjukan bahwa beberapa perahu penangkapan mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan.

D. Peternakan

Populasi ternak di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari; ternak sapi, kambing, ayam petelur, ayam buras dan itik. Sesuai dengan data dari dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan 2010, Jumlah populasi ternak di Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Total Ternak sapi pada tahun 2008 4.247 ekor meningkat menjadi 4,331 ekor pada tahun 2009, ternak kambing di tahun 2008 3.610 ekor meningkat menjadi 3.914 ekor pada tahu 2009, jumlah ayam petelur pada tahun 2008 adalah 3.110 ekor turun menjadi 595 ekor pda tahun 2009, jumlah ayam buras pada tahun 2008 adalah 46.825 ekor dan pada tahun 2009 menurun menjadi 32.800 ekor, sedangkan untuk jumlah ayam pedaging pada tahun 2008 adalah 20.050 ekor dan pada tahun 2009 menurun menjadi 19.200 ekor, untuk ternak itik tahun 2008 berjumlah 808 ekor meningkat menjadi 858 ekor pada tahun 2009.

E. Kehutanan

Luas areal hutan di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2009 sebesar 226,750 Ha, dimana hutan suaka alam merupakan lahan terluas yakni sebesar 68,250 Ha atau 30%, disusul oleh hutan lindung 24%, hutan konversi 21%, hutan produksi 18% dan hutan produksi terbatas sebesar 8%. Sementara itu, bila dilihat dari setiap kecamatan maka kecamatan Oba Utara memiliki hutan terluas yakni 51% dari luas areal hutan Kota Tidore Kepulauan, diikuti oleh kecamatan Oba Selatan sebesar 42%, sementara sisanya 7% tersebar di tiga kecamatan yang lain.

F. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu daya dukung pembangunan yang relatif besar di wilayah Kota Tidore Kepulauan, namun dalam pemanfaatannya masih sangat terbatas. Hal ini terkait dengan keterbatasan dukungan pembiayaan, penguasaan Iptek maupun belum adanya minat di bidang invetasi dan penanaman modal baik dalam maupun luar negeri. Disamping itu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal hingga tahun 2009 kepada 22 perusahan wajib Amdal baru mencapai 36,00%,

penindakan dan penegakan hukum terhadap lingkungan dengan 2 kasus telah ditangani 100%. Sedangkan penanganan sampah berdasarkan volume produksi tahun 2008 sebanyak 164 m^3 dan telah tertangani 66,37 m^3 (40,36%). Komposisi dan rasio tempat pembuangan sampah tahun 2008 sebanyak 252 m^3 persatuan penduduk adalah 0,27%.

G. Sumberdaya Mineral dan Bahan Galian

Wilayah Kota Tidore Kepulauan dikelilingi air laut seluas 4.293,2 Km2 (30,47%). Sedangkan air sungai yang mengaliri daerah ini terdapat di Kecamatan Tidore Timur (Kelurahan Mafututu). Pertambangan di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari bahan galian golongan A berupa emas dan tembaga diindikasikan terdapat di Payahe kecamatan Oba. Khusus galian C berupa batu apung yang terdapat di Kecamatan Tidore pernah dikelola oleh PT. Citra Pasific namun sekarang tidak berproduksi lagi. Adapun bahan galian B dan C berupa batu apung terdapat di Kecamatan Tidore (desa Supera, desa Akesahu, desa Suromalao dan desa Guruamalao). Tembaga dan asbes di Kecamatan Oba serta andesit di desa Bobo, Kelurahan Dokiri dan Soadara di Pulau Tidore. Disamping itu, potensi tanah liat di pulau Mare tidak saja memproduksi berbagai bahan tembikar, tetapi juga dapat dikembangkan untuk produksi genteng, lantai dan porselen.

H. Kebudayaan dan Pariwisata

Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan termasuk dalam lingkup budaya *Moloku Kie Raha,* yakni Empat Kerajaan di masa lalu masing-masing Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Hal ini karena keempat kesultanan tersebut berasal dari satu garis keturunan. Khusus untuk Kesultanan Tidore, tradisi pergantian kepemimpinan puncak untuk menduduki tahta Sultan tidak didasarkan pada otoritas tunggal Sultan yang berkuasa, tetapi mekanismenya diserahkan kepada 12 Gimalaha yang tersebar, masing-masing 6 di Toloa, 3 di Soasio, 1 di Buli, 1 di Tuguiha dan 1 di Patani. Oleh karena itu, tradisi demokrasi di Kesultanan Tidore kelihatannya lebih terbuka, karena disini kesempatan sangat terbuka bagi setiap warga masyarakat yang berada dalam lingkup 12 Gimalaha tersebut untuk dapat diangkat sebagai Sultan Tidore.

Berbarengan dengan itu, agama Islam sebagai agama kesultanan pun berkembang pesat sehingga turut mempengaruhi sistem-sistem adat di wilayah *Moloku Kie Raha*, termasuk di pulau Tidore dan sekitarnya. Bahasa daerah yang dominan dipakai masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari adalah bahasa Tidore. Selain itu terdapat masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang menggunakan bahasa Ternate, Makian dan bahasa Sangihe (Sangir).

Hidup dalam suasana tolong-menolong dan gotong royong, sudah menjadi ritme kehidupan sehari-hari di Kota Tidore Kepulauan. Kebiasaan-kebiasaan sosial itu sudah terlembagakan dalam istilah-istilah budaya lokal seperti : *Mayae*, yakni tolong-menolong. Istilah ini biasa dipakai untuk pembabatan kebun atau pembangunan rumah. Ada juga istilah *Mabari* dan *Morong* yang artinya sama dengan gotong-royong atau tolong-menolong. Selain aspek budaya, wilayah Kota Tidore Kepulauan juga menyimpan berbagai pesona pariwisata alam yang sangat mengagumkan. Obyek-obyek wisata alam tersebut antara lain:

1. Wisata Bahari/Tirta : Pantai Ake Sahu, Pantai Legenda Gamgau, Pantai Taman Cobo, Pantai Cobo, Pantai Tahua, Pantai Rum, Pantau Rum Tua, Pantai Somahode Kusu, Pantai Noramake, Pantai Loko, Pantai Tamong, Pantai Raja, Pantai Filonga, Pantai Woda, Pantai Joji, Pantai Mare, Pantai Maitara, Pantai Guratu, dan Pantai Sibu.
2. Wisata Alam : Danau Gurua Marasai, Air Terjun Luku Celeng, Ake Lada, Ale Bai, Talaga Dan Gua Mare.
3. Wisata Sejarah : Kadaton Kesultanan, Kadaton Biji Negara, Mesjid Sultan, Dermaga Sultan, Museum Malige Sonyine, Tugu Pendaratan Spanyol, Benteng Ts Tjobe, Benteng Tahula, Benteng Tore, Benteng Maresku, Makam Sultan Nuku, Makam Kapita Lau, Makam Imam Jawa Konora, Makam Mahdun Abd. Kadir, Makam Aulia Gamgau, Makam Jere Toroka, Makam Ebamadoa, Makam Sultan Syaifuddin Syah, Makam Sultan Djmaluddin, dan Makam Alhabib Umar Faroek
4. Wisata Seni dan Budaya : Rumah Adat Gimalaha Tomayou, Rumah Adat Tidore, Upacara Ritual Kesultanan, Legu Gam, Seni Kerajinan Bambu, seni Kerajinan

Geraba, pandai Besi Toloa, Tarian Soya-Soya, Tarian Dana-Dana, Debus dan Bambu Gila.

5. Wisata Agro : Agrowisata Gurabunga, Agrowisata Kalaodi, Agrowisata Lada Ake dan Agrowisata Desa Talaga.
6. Makanan Khas : Makanan Khas Papeda dan Gohu

Semua potensi wilayah yang di uraikan di atas belum mampu menghasilkan devisa bagi Kota Tidore Kepulauan akibat minimnya sumber pembiayaan pembangunan, infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Infrastruktur Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan, pengembangan sistem kota-kota didasarkan pada identifikasi lokasi sentra-sentra kegiatan, analisis sentralitas permukiman dan pola perhubungannya. Dari analisis ini diketahui bahwa secara lokal, ibukota kecamatan merupakan pusat primer untuk masing-masing kecamatan. Selain itu, diketahui juga beberapa pusat desa yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat sekunder dan tersier.

B. Jaringan Transportasi

Sektor perhubungan memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi suatu daerah, untuk memperlancar arus distribusi barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sampai dengan tahun 2009, panjang jalan provinsi yang ada di Kota Tidore Kepulauan sepanjang 251 km dan jalan kota sepanjang 250.51 km. Dari jumlah tersebut kondisi jalan provinsi yang tergolong kondisi baik tercatat 95 km dan 156 km tergolong kondisi rusak, sedangkan kondisi jalan kota yang tergolong kondisi baik 216.23 km, kondisi rusak sedang 14.40 km dan kondisi rusak 10.48 km serta kondisi rusak berat 9.40 km. Pertumbuhan kendaraan bermotor tahun 2009 berkurang menjadi 437 unit kendaraan dari tahun 2008 yang berjumlah 516 unit. Namun berdasarkan jenis kendaraan, Angkutan Sewa, Mobil Truk dan Mobil *Pick Up* tercatat mengalami kenaikan yang positif angkutan sewa dari 35 di tahun 2008 meningkat menjadi 47 unit, sedangkan mobil truk dari 103 unit pada tahun 2008 meningkat menjadi 120 unit pada tahun 2009.

Sarana dan prasarana perhubungan laut tersedia lima simpul angkutan laut (Rum, Soasio, Sofifi, Loleo, dan Gita) serta ASDP di Rum dan Dowora, pelabuhan yang ada tingkat kesibukan yang paling tinggi adalah pelabuhan *speedboat* di Rum yang menjadi pelayaran utama antara Tidore dan Ternate, sarana dan prasaran perhubungan darat terdapat di terminal Rum, Soasio, Sofifi dan Gita. Untuk sarana komunikasi di Kota Tidore Kepulauan dilayani komunikasi dilayani oleh PT Telkom, PT Pos Indonesia dan jaringan seluler, namun belum merata di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.

C. Politik dan Hukum

Sejak reformasi hingga tahun 2009 telah diselenggarakan tiga kali pemilihan legislatif dan dua kali pemilihan kepala daerah, dalam perspektif pembinaan dan pendidikan politik rakyat masih didominasi oleh peran partai politik. Namun untuk menjamin kesinambungan pembangunan diperlukan dukungan keaman dan ketertiban masyarakat secara kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut hingga tahun 2009, telah tersedia berbagai pranata sosial meliputi: 13 LSM, 22 Ormas, 35 OKP.

Pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan di Kota Tidore Kepulauan berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dengan terselenggaranya forum komunikasi antara pemerintah daerah, pimpinan DPRD, tokoh agama dan tokoh adat dalam kesetaraan dan keterbukaan. Selain itu, ada peningkatan pengetahuan dan wawasan politik masyarakat yang dapat dilihat dengan tingginya partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota, dengan pemilih laki-laki 33.658 dan perempuan 33.378 dari total jumlah pemilih 67.036 jiwa .

Dinamika politik di Kota Tidore sangat dinamis, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah keterwakilan rakyat di DPRD melalui partai-pertai yang berkompetisi di pemilu baik 2004 dan 2009, komposisi anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan tidak di dominasi oleh salah satu partai, tetapi di wakili oleh 13 partai dari 20 anggota, dengan komposisi; Golkar 4 anggota, PDIP 3 anggota, PPP 2 anggota, PAN 2 anggota, Demokrat 1 anggota, PBR 1 anggota, PDK 1 anggota, PDP 1 anggota, PBB 1 anggota, Marhaen 1 anggota, Kedaulatan 1 anggota, PKPB 1 anggota dan PKS 1 anggota. Hingga tahun, 2010 produk hukum yang dihasilkan oleh Kota Tidore Kepulauan adalah 88 Peraturan Daerah

D. Ketertiban dan Keamanan

Kebijakan pembangunan seharusnya diarahkan pada penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat. Menurut data yang tersedia dari kepolisian, tercatat jumlah peristiwa gangguan keamanan ketertiban masyarakat di Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2008 sampai 2010 meningkat hampir dua kali lipat dari 114 menjadi 213 peristiwa. Kisaran ganguan keamanan pada bulan januari hingga desember tahun 2008 adalah 7-15 peristiwa ganguan pada setiap bulannya, sedangkan pada tahun 2009 rata-rata meningkat dari bulan januari hingga Desember yaitu berkisar antara 11-21 jumlah peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Untuk membantu terciptanya keamanan dan ketertiban di Kota Tidore Kepulauan, Kepolisian Kota Tidore Kepulauan ini memiliki personil polisi yang tersebar di 6 kesatuan dengan jumlah personil polisi dari tahun 2008 sejumlah 255 mengalami peningkatan menjadi 282 di tahun 2009.

Untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di dukung oleh 30 personil satuan polisi pamong praja, dengan rasio persatuan penduduk adalah 0,03%. Rasio lembaga perlindungan masyarakat persatuan penduduk adalah 0,60% (552 Personil) dengan penyebaran 216 unit poskamling dengan rasio persatuan penduduk adalah 0,23%. Kondisi pranata sosial yang memadai inilah berimplikasi pada tugas-tugas meminimalisir kriminalitas yang terjadi di daerah ini cederung terus menurun. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi masyarakat yang mutlak harus di ciptakan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sampai dengan akhir tahun 2009 tercatat ada 89 (52%) dari 128 peristiwa gangguan keamanan yang dilaporkan dan diselesaikan oleh jajaran keamanan.

E. Pemerintahan Daerah

Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 8 kecamatan dan 72 desa/kelurahan sejak tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13, 14, 15 dan 16 tahun 2007 serta Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008. Jumlah kelurahan dan desa adalah; Kecamatan Tidore memiliki 11 kelurahan, Kecamatan Tidore Utara 10 kelurahan 2 desa, Tidore Selatan memiliki 6 kelurahan 2 desa, Kecamatan Tidore Timur memiliki 4 kelurahan,

Kecamatan Oba Utara memiliki 10 desa 2 kelurahan, Kecamatan Oba Tengah memiliki 1 Kelurahan 8 desa, Kecamatan Oba memiliki 1 Kelurahan 8 desa dan Kecamatan Oba Selatan memiliki 7 desa.

Berdasarkan data dari Bagian Kepegawaian dan Diklat Kota Tidore Kepulauan tahun 2010, jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kota Tidore Kepulauan adalah sebesar 4,319 pegawai yang tersebar di 33 instansi. Dari jumlah tersebut yang memiliki pangkat golongan IV sebayak 473 orang (10,95%), golongan III sebanyak 4,416 orang (55,94%), golongan II sebanyak 1,411 orang (32,67%) dan golongan I sebanyak 19 orang (0,44%).

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing Daerah bertujuan untuk memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif masing-masing wilayah dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan di daerah, mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek, pembangunan infrastruktur yang maju, serta reformasi di bidang hukum dan aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung pembangunan daerah.

Sektor pertanian dalam arti luas menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi yang berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi lokal yang tangguh. Hal ini tentunya harus disesuaikan dengan kearifan dan karakteristik potensi unggulan lokal, sehingga diharapkan akan menggerakkan pertumbuhan sektor lainnya seperti industri pengolahan dan jasa di Kota Tidore Kepulauan.

Dibidang pariwisata, ditemukan sejumlah hal yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di kota Tidore Kepulauan , seperti: (1) minimnya pembangunan kepariwisataan; (2) kurangnya kemampuan dalam mengelola sumber-sumber wisata; dan (3) lemahnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan

kebudayaan dan pariwisata. Kedepan pariwisata perlu dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi lokal dan memperluas kesempatan kerja. Pengembangan pariwisata Tidore Kepulauan perlu menjadi sektor unggulan, karena memiliki keunikan tersendiri, untuk itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi lokal sebagai wilayah sejarah, adat dan alam yang dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah. Dalam rangka peningkatan pariwisata, maka kawasan-kawasan wisata perlu dibangun dan dikembangkan sebagai pusat lokomotif ekonomi Kota Tidore Kepulauan.

Perdagangan domestik diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi lokal yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian provinsi dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi lokal, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang terjangkau.

Dilihat dari kondisi fisik wilayah, maka sumbangan sektor pertanian, sektor perkebunan dan sektor perikanan terhadap pembentukan PDRB Kota Tidore Kepulauan masih terlihat mendominasi, karena daerah ini memiliki luas laut dan daratan dengan potensi terkandung di dalamnya yang sangat besar. Namun sektor-sektor unggulan tersebut belum terlihat mampu menunjang pertumbuhan sektor ekonomi lainnya seperti sektor perdagangan dan sektor jasa, sehingga ke depan, sektor perdagangan dan jasa perlu mendapat perhatian serius untuk lebih dikembangkan sehingga memiliki kontribusi yang lebih besar bagi pembentukan PDRB Kota Tidore Kepulauan.

Keberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai akselerator, regulator dan fasilitator juga masih terlihat kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dunia usaha dalam peningkatan daya saing dan melakukan promosi potensi unggulan lokal, menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks *global services*; mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang melalui pembangunan

pelabuhan baik laut dan udara, membangun fasilitas angkutan masal untuk daerah perkotaan dan perdesaan, serta menciptakan sistem transportasi lokal dan sistem transportasi wilayah yang juga masih rendah.

Rendahnya pengembangan agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta lemahnya basis produksi dan daya saing industri lokal melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM di berbagai sektor termasuk pariwisata juga masih terlihat memprihatinkan di Kota Tidore Kepulauan. Kelemahan mendasar bahwa kemajuan ekonomi yang selama ini dicapai belum diikuti oleh peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi yang akhirnya meruntuhkan kepercayaan para pelaku usaha. Oleh karenanya, di samping rentan terhadap gangguan eksternal, struktur perekonomian daerah akan sulit berkembang manakala dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat baik dalam tataran provinsi, nasional terlebih internasional pada kualitas produk, pemasaran hasil-hasil produksi maupun pada peningkatan investasi, dalam era perekonomian dunia yang semakin terbuka.

Rendahnya kinerja investasi di Kota Tidore Kepulauan juga disebabkan oleh keterbatasan SDM lokal dan daya saing produksi *(supply side)* serta kapasitas dari sistem dan jaringan infrastruktur daerah yang kurang memadai dan sebagian besar rusak akibat konflik beberapa waktu yang lalu serta termakan usia. Selain itu, keterbatasan kapasitas infrastruktur berpengaruh pada tingginya biaya distribusi yang memperburuk daya saing produk-produk lokal, terutama masalah jaringan transportasi darat dan laut yang mengakibatkan munculnya biaya ekonomi tinggi di wilayah ini.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Reformasi sistem pemerintahan sentralisitik ke desentralistik memberikan implikasi bagi sistem penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (UU 32/2004), dalam penyelenggaraan pembangunan berdasarkan karakteristik social masyarakat, sehingga membutuhkan keseimbangan pengelolaan keuangan berdasarkan beban kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui perimbangan keuangan yang seimbang (UU33/2004).

Desentralisasi kewenangan yang diikuti dengan desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi daerah untuk menciptakan kreatifitas pengelolaan pemerintahan dan keuangan yang mempertimbangkan kapasitas perekonomian daerah, sehingga terjadi keseimbangan antara kepentingan penerimaan daerah dan kepentingan terhadap peningkatan investasi di daerah yang dapat memberikan ruang bagi penciptaan lapangan kerja dan pegentasan kemiskinan.

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah dalam asas desentralisasi, maka Kota Tidore Kepulauan memiliki struktur pendapatan yang meliputi: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan yang di pisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan, yang dibagi atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, sedangkan sumber lain yang juga memberikan konstribusi terhadap pendapatan yaitu 3) Lain-lain pendapatan yang sah, yang dapat berbentuk Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi yang dialokasi melalui Provinsi dan dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan dana

masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Tidore Kepulauan yang memberikan kontribusi lebih dari 75% dari total pembangunan.

3.1 Arah Pengelolaan APBD

3.1.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan bagi Kota Tidore Kepulauan, didasari pada beban kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga dalam kebijakan peningkatan penerimaan daerah tetap mempertimbangkan kemampuan kinerja ekonomi dan keseimbangan fiskal. Bagi sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, diwujudkan dalam kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan ekonomi, hal ini dimaksudkan agar upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tidak secara gradual berdampak buruk bagi penurunan investasi dan menghambat mobilitas barang dan jasa antar wilayah dan kawasan.

Dari struktur pendapatan Kota Tidore Kepulauan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah, belum menunjukan kemandirian fiskal daerah, faktor yang sangat dominan adalah ketergantungan terhadap dana perimbangan yang rata-rata pertahun mencapai 90%, sehingga pemerintah Kota Tidore akan mengalami masalah serius dibidang keuangan jika pemerintah pusat menghentikan dana perimbangan, dan menuntut Kota Tidore mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan secara terstruktur, terrencana, terkoordinasi, dan pengendalian/pengawasan yang seimbang sehingga tidak mengakibatkan efek domino dari upaya optimalisasi pendapatan dengan beban investasi sehingga kinerja ekonomi yang bertumpu pada konsumsi sulit dihindari dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada produksi dalam jangka menengah maupun panjang.

Tabel 3.1: Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2010

JENIS PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN 2005		TAHUN ANGGARAN 2006		TAHUN ANGGARAN 2007		TAHUN ANGGARAN 2008		TAHUN ANGGARAN 2009		TAHUN ANGGARAN 2010	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Pendapatan Asli Daerah	**2,819,700**	**2,574,219**	**3,766,805**	**5,237,250**	**4,143,487**	**7,634,066**	**6,240,602**	**8,354,648**	**9,850,325**	**9,090,792**	**8,436,000**	**6,924,121**
Pajak Daerah	785,200	433,546	870,621	889,049	858,500	2,080,203	1,623,553	1,523,002	2,000,000	1,584,543	2,285,000	2,035,584
Retribusi Daerah	1,829,500	1,473,075	2,057,060	1,936,883	1,884,987	2,512,890	2,440,130	2,527,626	3,161,500	2,798,863	2,752,000	2,824,049
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	2,083	-	-	-	37,500	120,000	148,944	140,000	217,605
Lain-Lain PAD Yang Sah	205,000	667,598	839,124	2,409,235	1,400,000	3,040,973	2,176,919	4,266,520	4,568,825	4,558,442	3,259,000	1,846,883
Dana Perimbangan	**106,616,221**	**114,714,541**	**225,255,707**	**234,929,511**	**267,556,171**	**288,747,942**	**295,277,555**	**302,181,254**	**311,776,823**	**306,654,094**	**315,022,665**	**328,197,491**
Dana Bagi Hasil Pajak	8,718,377	14,666,382	13,976,207	22,700,045	16,004,649	25,185,841	21,070,973	25,541,947	19,800,122	25,437,262	21,159,211	29,640,191
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3,091,844	3,043,643	2,626,500	2,553,786	3,552,522	15,563,101	9,309,302	11,742,027	9,592,661	8,013,688	4,840,789	9,534,635
Dana Alokasi Umum	86,296,000	86,296,000	176,393,000	176,392,999	206,550,000	206,550,000	215,237,280	215,237,280	229,386,040	220,205,144	262,423,165	262,423,165
Dana Alokasi Khusus	8,510,000	10,708,516	32,260,000	33,282,681	41,449,000	41,449,000	49,660,000	49,660,000	52,998,000	52,998,000	26,599,500	26,599,500
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	**978,200**	**305,692**	**1,344,414**	**979,956**	**841,767**	**830,010**	**1,401,364**	**2,264,581**	**2,300,000**	**656,016**	**3,194,000**	**1,233,307**
Bagi Hasil Pajak Provinsi	978,200	305,692	1,344,414	979,956	841,767	830,010	1,401,364	2,264,581	2,300,000	656,016	3,194,000	1,233,307
TOTAL PENDAPATAN	**110,414,121**	**117,594,452**	**230,366,926**	**241,146,717**	**272,541,425**	**297,212,018**	**302,919,521**	**312,800,483**	**323,927,148**	**316,400,902**	**326,652,665**	**336,354,919**

Sumber: APBD berbagai tahun (di olah)

Dari tabel 3.1 komposisi pendapatan daerah di dominasi dari dana perimbangan, sehingga ketergantungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap dana perimbangan relatif sangat tinggi mencapai rata-rata pertahun sebesar 90%, dari komponen dana perimbangan yang memberikan konstribusi signifikan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga ketergantungan pada DAU yang memiliki resistensi yang sangat tinggi bagi jaminan current rasio pemerintah daerah dalam menjamin likuiditas pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam jangka menengah.

Struktur penerimaan yang lemah ini, menyimpan peluang untuk mengalami keguncangan, apabila Dana Perimbangan, yang disalurkan pemerintah pusat mengalami penurunan drastis, yang diakibatkan dari penurunan pendapatan netto Negara, sementara Pendapatan Asli daerah tidak dapat menjamin kelangsungan belanja pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sehinga perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan asli daerah yang potensial, untuk menjamin kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

3.1.2 Arah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas, sehingga mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya dan mengakibatkan ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif pajak dan retribusi yang kompetitif.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik sehingga Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi, dengan demikian perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan seperti, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota.

Selain perluasan pajak, dilakukan juga perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Tabel 3.2: Perkembangan Rencana dan Realisasi PAD Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2005-2010

Tahun	Target		Realisasi	
	Jumlah	Pertumbuhan	Jumlah	Pertumbuhan
2005	2,819,700		2,574,219	
2006	3,766,805	33.59	5,237,250	103.45
2007	4,143,487	10.00	7,634,066	45.76
2008	6,240,602	50.61	8,354,648	9.44
2009	9,850,325	57.84	9,090,792	8.81
2010	8,436,000	-14.36	6,924,121	-23.83
Rata-Rata	7,051,384	27.54	7,963,019	28.73

Sumber: Perda APBD Tahun 2005 -2010, diolah

Penambahan dan perluasan objek pajak dan retribusi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi memberikan potensi bagi Kota Tidore Kepulauan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tentu dengan mempertimbangkan dampak pengenaan pajak dan retribusi terhadap invetasi, mobilitas barang dan jasa, ekspor/impor dan peningkatan pelayanan public utamanya bagi masyarakat miskin. Berdasarkan data yang disajikan dalam 5 tahun terakhir menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah cenderung menunjukan realisasi yang positif dari penetapan target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan pengkajian tentang potensi kapasitas fiskal dalam peningkatan PAD, dengan mempertimbangkan potensi pajak Kota tidore Kepulauan, sebagai dasar dalam penentuan target PAD yang sesuai dengan potensi pajak dan retribusi.

Tabel 3.3: Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah,(PAD) Kota Tidore Kepulauan, 2005-2010

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Pengelolaan Kekayaan dipisahkan		Lain PAD Yg Sah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2005	433,546	0	1,473,075	0	-		667,598	
2006	889,049	105.06	1,936,883	31.49	2,083	100.00	2,409,235	260.88
2007	2,080,203	133.98	2,512,890	29.74	-	-100.00	3,040,973	26.22

2008	1,523,002	-26.79	2,527,626	0.59	37,500	100.00	4,266,520	40.30
2009	1,584,543	4.04	2,798,863	10.73	148,944	297.18	4,558,442	6.84
2010	2,035,584	28.47	2,824,049	0.90	217,605	46.10	1,846,883	-59.48
Rata-Rata	3,357,930	48.95	2,814,677	14.69	1,709,185	88.66	81,226.40	54.95

Sumber : APBD berbagai tahun, data diolah

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dalam 5 tahun terakhir menunjukan kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan PAD yang bersumber dari Pajak (48.95%), Retribusi (14,69%), dan lain-lain PAD yang sah (54.95), sehingga dalam 5 tahun kedepan dalam perencanaan pembangunan masih berpotensi meningkatkan PAD, baik dalam penetapan pajak dan retribusi berdasarkan objek pajak dan objek retribusi yang telah ditetapkan maupun potensi yang masih dapat dikembangkan sesuang dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Tabel 3.4: Perkembangan Realisasi APBD dan PAD serta Konstribusi PAD Terhadap APBD Kota Tidore Kepulauan, 2005-2010

Tahun	APBD		PAD		Konstribusi PAD vs APBD
	Jumlah	Pertumbuhan	Jumlah	Pertumbuhan	
2005	117,594,452	0	2574219	0	2.19
2006	241,146,717	105.07	5237250	103.45	2.17
2007	297,212,018	23.25	7634066	45.76	2.57
2008	312,800,483	5.24	8354648	9.44	2.67
2009	316,400,902	1.15	9090792	8.81	2.87
2010	336,354,919	6.31	6924121	-23.83	2.06
Rata-Rata	324,301,898	28.20	7,963,019	28.73	2.91

Sumber: Data Tahun 2005 s.d 2010)

Memperhatikan kemampuan keuangan yang bersumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 2,91% (Tabel 3.4), belum dapat menjamin keberlangsungan pembangunan, pelayanan public, dan berbagai kebutuhan investasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan,

rendahnya konstrbusi PAD terhadap APBD, dipengaruhi oleh berbagai factor, (1) Rendahnya ketaatan wajib pajak, (2) system pengelolaan/manajemen perpajakan belum tertata secara baik, (3) potensi pajak dan retribusi yang terbatas, (4) dukungan regulasi dibidang pajak dan retribusi belum dioptimalkan dan fakor-faktor eksternal.

Potensi pajak dan retribusi Kota Tidore Kepulauan dalam jangka menengah, diperhitungkan dengan asumsi terhadap perluasan jenis pajak dan retribusi serta lain-lain PAD yang sah, dalam 5 tahun kedepan masih cenderung mengalami pertumbuhan yang positif sehingga diprediksi dalam 5 tahun kedepan secara bertahap konstribusi PAD terhadap APBD berpotensi mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 3.5: Prediksi Pendapatan Asli Daerah, Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan

JENIS PENDAPATAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	**9,543,233**	**10,883,200**	**12.406.800**	**14.143.750**	**16.123.800**
Pajak Daerah	3,032,064	3.494.400	4.000.000	4.560.000	5.198.400
Retribusi Daerah	3,238,855	3.692.300	4.209.000	4.898.300	5.585.000
Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	410,526	431.500	479.300	646.450	736.400
Lain-Lain PAD Yang Sah	2,861,788	3.262.800	3.718.500	4.039.000	4.604.000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan prediksi pertumbuhan PAD yang cenderung positif, maka arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah, dilakukan dengan beberapa kebijakan antara lain :

a. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan penekanan kepada beberapa jenis pajak dan retribusi yang dianggap potensi didalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Intensifikasi pajak/retribusi, dilakukan melalui :
   1. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan penerimaan daerah,
   2. Optimalisasi pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dengan memberikan peran kepada DPRD dan Masyarakat untuk

menginisiasi usulan, pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah yang bersifat partisipatif,

3. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah,
4. Peningkatan pengawasan dan penataan manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja, utamanya SKPD penghasil dalam mendorong peningkatan PAD, melalui pemberian upah pungut dan balas jasa yang seimbang kepada aparatu pemungut pajak dan retribusi,

Sedangkan Ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui :

1. Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah,
2. Pengkajian mekanisme pajak/retribusi untuk target grup baru termasuk *underground* ekonomi,

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya aparat pengelola pendapatan daerah dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembelajaran terhadap masalah-masalah pendapatan dan keuangan daerah,
c. Melaksanakan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru,
d. Melaksanakan sosialisasi sadar pajak melalui berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah,

3.1.3 Arah Pengelolaan Pendapatan Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya, memiliki prospek yang cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi memerlukan perhatian yang cukup

serius dari pemerintah daerah untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam.

Sumber pendapatan yang potensial disumbangkan dari Dana Perimbangan, sehinga ketergantungan pemerinta Kota Tidore Kepulauan relative tinggi, sumber yang memberikan konstribusi yang signifikan terhadap Dana Perimbangan bersumber dari Dana Alokasi Umum. Aloasi dan ini didasari pada indicator daerah, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan IPM, sehingga dibutuhkan proaktif pemerintah daerah dalam mendorong data-data perhitungan sehingga tidak mengakibatkan alokasi dana yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah.

Dana Alokasi Khusus, sebagai instrument kebijakan pemerintah pusat yang di daerahkan dimaksudkan untuk pelaksanaan program-program pusat yang menjadi prioritas pemerintah pusat di bebankan kepada daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga alokasi anggaran yang relative besar bersumber dari DAK sector pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dalam 5 tahun terakhir perluasan terhadap sumber alokasi DAK seperti sector perikanan, perhubungan, perumahan rakyat, lingkungan dan lainnya, yang membutuhkan informasi yang lebih terrinci, sehingga beban DAK yang berbasis pada departemen dapat dialokaskan pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan maka dibutuhkan SKPD yang menangani DAK tersebut secara konsisten menyampaikan perkembanga data-data kepada Departemen sebagai sumber informasi dalam alokasi DAK, oleh karena dalam 3 tahun terakhir beberapa jenis DAK yang menjadi kebutuhan masyarakat Tidore Kepuluan justru tidak teralokasi pada pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sumber lain yang juga merupakan bagian dari Dana Perimbangan adalah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, yang fluktuasinya sangat tinggi, dan tidak memiliki kejelasan data yang akurat, sehingga sulit menggunakan instrument pengukuran untuk mendeteksi berapa sesunguhnya beban alokasi setelah penetapan oleh menteri keuangan terhadap beban alokasi anggaran pada setiap tahun anggaran.

Tabel 3.6 : Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2005 – 2010 Kota Tidore Kepulauan

Tahun	Bagi Hasil Pajak		Bagi Hasil Bukan Pajak		DAU		DAK	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2005	14,666,382	0	3,043,643	0	86,296,000		10,708,516	
2006	22,700,045	54.78	2,553,786	-16.09	176,392,999	104.40	33,282,681	210.81
2007	25,185,841	10.95	15,563,101	509.41	206,550,000	17.10	41,449,000	24.54
2008	25,541,947	1.41	11,742,027	-24.55	215,237,280	4.21	49,660,000	19.81
2009	25,437,262	-0.41	8,013,688	-31.75	220,205,144	2.31	52,998,000	6.72
2010	29,640,191	16.52	9,534,635	18.98	262,423,165	19.17	26,599,500	-49.81
Rata-Rata	28,634,334	16.65	10,090,176	91.20	233,420,918	29.44	42,939,539	42.41

Sumber : APBD berbagai Tahun, Data diolah, 2011

Dana Perimbangan sebagai kebiajakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal *(fiscal gap)* antar daerah yang terlalu tinggi, sehingga beban alokasi Dana Perimbangan disesuaikan dengan indicator-indikator pembangunan daerah. Untuk jenis bagi hasil pajak dan bukan pajak, belum secara transparan pemerintah pusat menyajikan data bagi beban alokasi kepada setiap daerah, sehingga penetapan pagu sementara setiap tahun melalui menteri keuangan, hanya bersifat indikatif, dan sangat berpotensi fluktuatif, dampak yang dirasakan bagi daerah sulit bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk memprediksi potensi realisasi yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki criteria yang jelas dan cenderung sesuai dengan penetapan awal dalam Peraturan Presiden, dengan indicator-indikator yang terukur transparan dan memiliki akuntabilitas yang baik dalam alokasi DAU.

Dana Alokasi Khusus (DAK), memiliki keunikan tersendiri, oleh karena penetapan program/kegiatan dan anggaran bersifat terpusat melalui departemen, sehingga alokasi DAK sangat tergantung pada peran SKPD pengelola DAK dalam menyajikan data kebutuhan pembangunan sektoral, yang juga merupakan prioritas pemerintah pusat yang di daerahkan, sehingga dalam tahun 2001 Kota Tidore Kepulaun tidak mendapatkan alokasi DAK Kesehatan Pelayanan Rujukan, Air Minum, Sanitasi, Prasarana Pemerintah, Lingkungan Hidup, Keluarga Beencana, Kehutanan, Sarana Prasarana Pedesaan dan Perdagangan, dan Perumahan Rakyat

Tabel 3.7: Perkembangan Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2010

Tahun	Bagi Hasil Pajak		Bagi Hasil Bukan Pajak		DAU		DAK	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2005	14,666,382	0	3,043,643	0	86,296,000		10,708,516	
2006	22,700,045	54.78	2,553,786	-16.09	176,392,999	104.40	33,282,681	210.81
2007	25,185,841	10.95	15,563,101	509.41	206,550,000	17.10	41,449,000	24.54
2008	25,541,947	1.41	11,742,027	-24.55	215,237,280	4.21	49,660,000	19.81
2009	25,437,262	-0.41	8,013,688	-31.75	220,205,144	2.31	52,998,000	6.72
2010	29,640,191	16.52	9,534,635	18.98	262,423,165	19.17	26,599,500	-49.81
Rata-Rata	28,634,334	16.65	10,090,176	91.20	233,420,918	29.44	42,939,539	42.41

Sumber : APBD 2005-2010, data diolah

Pertumbuhan Dana Perimbangan cenderung positif, seiring dengan pertumbuhan Pendapatan Netto Negara yang bersumber dari Penerimaan dalam negeri, yang merupakan indicator utama dalam memperhitungkan dana perimbangan bagi daerah-daerah otonomi, bagi Kota Tidore Kepulauan, Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan yang potensial, dan cenderung memiliki ketergantungan yang sangat tinggi bagi pemerintah pusat, fenomena ini juga terjadi di Kabupaten/Kota lainnya, namun diperlukan langkah-langkah strategi dalam upaya mendorong kemandirian daerah, sehingga dalam 5 tahun kedepan sumbangan pendapatan daerah masih sangat tergantung pada dana bagi hasil, dengan harapan secara bertahap perbaikan ekonomi yang memiliki potensi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 3.8 : Prediksi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan

Jenis Pendapatan	2011	2012	2013	2014	2015	Asumsi % Pertubuhan (rata-rata 94,32 %)
Dana Perimbangan	397,059,789	449,033,295	477,763,937	522,420,742	558,017,506	
Dana Bagi Hasil Pajak	34,575,283	37,936,000	41,092,276	43,689,307	46,013,578	16, 65 %
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	11,087,827	12,349,622	13,530,246	14,926,567	16,259,509	19,00 %
Dana Alokasi Umum	313,516,331	351,859,378	372,970,941	411,125,868	439,904,679	19,20 %
Dana Alokasi Khusus	37,880,348	46,888,295	50,170,475	52,678,999	55,839,739	42,44 %

3.1.4 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Reformasi keuangan Negara melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, menganut prinsip-prinsip yang tergandung dalam konsep good governance, dengan 3 prinsip utama yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, sehingga dalam setiap perumusan tata kelola keuangan menganut konsep dasar yang dikenal dengan Value for money, yang mendasari pada anggaran berbasis kinerja, ini dimaksudkan agar setiap pengeluaran publik yang memanfaatkan keuangan Negara dilakukan secara efisiensi, efektifitas dan professional dalam tata kelola keuangan, yang secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran pemerintah Kota Tidore Kepulauan, diperuntukan bagi pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berdasar urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, berdasarkan pada pelaksanaan urusan-urusan pemerintah Kota tidore Kepulauan, alokasi belanja Tahun 2005-2009 sebagai berikut:

Tabel 3.9 : Belanja pemerintah Kota tidore Kepulauan tahun Anggaran 2005-2009

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2005		TAHUN ANGGARAN 2006		TAHUN ANGGARAN 2007		TAHUN ANGGARAN 2008		TAHUN ANGGARAN 2009	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Belanja										
Belanja Operasi	**108,299,509**	**92,636,210**	**168,995,115**	**134,554,913**	**222,549,666**	**189,438,369**	**260,760,489**	**237,391,620**	**270,228,122**	**245,873,458**
Belanja Pegawai	73,356,823	61,584,675	111,492,446	82,581,978	120,834,980	101,451,913	142,136,044	128,727,844	156,670,065	141,858,591
Belanja Barang	19,089,715	16,625,750	37,979,593	34,445,270	78,493,807	69,487,381	91,040,549	83,230,514	87,772,087	78,873,082
Belanja Bunga	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	17,490,179	16,280,581	23,895,196	23,213,976	20,765,670	20,320,934
Belanja Bantuan Keuangan	15,184,471	14,066,269	18,523,077	17,134,892	1,730,700	1,700,700	2,688,700	1,976,200	4,120,300	3,990,300
Belanja Tak Terduga	668,500	359,606	1,000,000	392,772	4,000,000	517,794	1,000,000	243,087	900,000	830,551
Belanja Modal	**22,804,952**	**20,202,363**	**85,648,995**	**78,286,620**	**103,210,219**	**96,902,164**	**106,756,986**	**100,135,224**	**95,445,610**	**96,442,272**
Belanja Tanah	1,057,593	1,049,154	4,096,651	4,088,926	3,219,641	3,209,713	1,857,814	1,855,589	1,844,895	2,194,894
Belanja Peralatan dan Mesin	5,434,188	5,429,918	12,502,203	11,077,447	23,628,225	21,427,688	21,390,374	21,160,366	16,919,516	16,579,491
Belanja Gedung dan Bangunan	13,098,171	10,512,722	36,452,433	31,835,225	40,654,759	37,446,630	63,803,368	60,269,155	45,043,851	45,467,634
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,109,000	3,104,699	31,314,701	30,008,651	35,449,043	34,563,012	18,466,677	16,213,685	31,604,847	31,929,115
Belanja Aset Tetap Lainnya	106,000	105,871	1,283,007	1,276,372	258,550	255,120	1,051,110	455,786	32,500	271,138
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	187,644	180,644	-	-
TOTAL BELANJA	**131,104,461**	**112,838,663**	**254,644,111**	**212,841,532**	**325,759,886**	**286,340,532**	**367,517,475**	**337,526,845**	**365,673,732**	**342,315,731**

Struktur belanja pemerintah kota Tidore Kepulauan belum menunjukan keberpihakan yang jelas dan terarah bagi peningkatan pelayanan publik, hal ini tergambar dalam beban alokasi belanja, selama 5 (lima) Tahun terakhir menunjukan bahwa belanja tidak Langsung (BTL) mencapai 71.83% dari total belanja, sehingga data menunjukan bahwa beban alokasi belanja yang menyerap anggaran yang signifikan pada belanja pegawai yang mencapai 41.44% dari total belanja Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tingginya beban alokasi belanja pegawai dipengaruhi oleh struktur organisasi yang relative besar dengan jumlah pegawai yang dari tahun ketahuan mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Tingginya beban belanja pegawai belum diikuti dengan peningkatan kinerja aparatur, sehingga jika dibandingkan dengan belanja yang terkait dengan kebutuhan pelayanan publik sangat rendah. Belanja yang dialokasikan untuk belanja tanah 0,64%, belanja peralatan dan mesin (4,84), belanja gedung dan bangunan (13.28%), belanja jalan, irigasi dan jaringan (9,33%), dan belanja asset tetap lainnya (0,08)

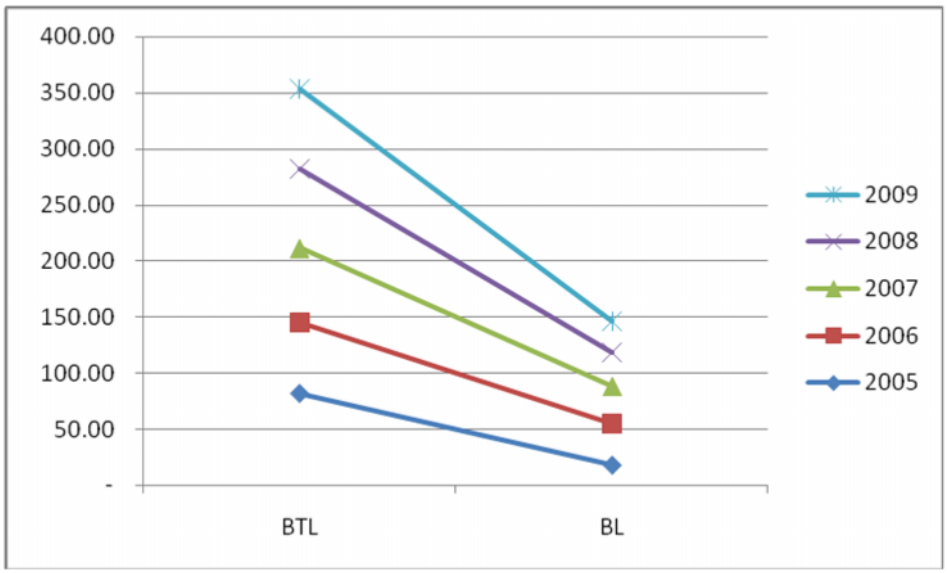

3.1.5 Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

APBD Kota Tidore Kepulauan setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pembiayaan, pertumbuhan defisit anggaran tersebut rata-rata per tahun selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010) mengalami peningkatan sebesar 59,73 %, untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari penerimaan pembiayaan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 16,81%, begitu pula pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 7,26%.

Tabel 3.10: Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2005 s/d 2009

TAHUN	PEMBIAYAAN		SURPLUS/DEFISIT	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2005	14,828,299,361.00	(10,617,833,237.00)	(14,828,299,361.00)	10,617,833,243.00
2006	24,277,182,835.00	(28,305,188,368.00)	(24,277,182,835.00)	28,305,188,368.00
2007	50,818,460,043.00	50,921,564,568.00	(50,818,460,043.00)	14,563,021,062.00
2008	64,597,951,526.00	65,337,758,280.11	(64,597,951,526.00)	(22,841,173,319.09)
2009	41,746,584,961.02	42,234,823,402.02	(41,746,584,961.02)	(12,018,013,082.79)
Jumlah	**196,268,478,726.02**	**119,571,124,645.13**	**(196,268,478,726.02)**	**18,626,856,271.12**

Sumber: APBD Tahun Anggaran 2005-2010 Kota Tidore Kepulauan

3.2 Arah Kebijakan APBD dan Dana Masyarakat/Mitra

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2010-2015, senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran,
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil,
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran,

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2010-2015 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah meliputi :
   a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala Peraturan Daerah Pajak Dan Retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah,
   b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian,
   c. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
   d. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi,
   e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD Penghasil,

f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah,
g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,
h. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah,

2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiscal *(fiscal gap)* sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal *(fiscal need)* dengan kapasitas fiskal *(fiscal capacity).* Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
   a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB,
   b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan,
   c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan,
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga, dan sumber-sumber lain yang potensial.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2010-2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2010-2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM Tahun 2009 yang baru sebesar

65.72, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2010-2015 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan,
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya,
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Tidore Kepulauan,
4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum,
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 (Sembilan) Tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 (dua belas) Tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau,
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah pedalaman dan pesisir, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat,

7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan,
8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 15% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan,
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik,
10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam,
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur,
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap *(fixed cost),* Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan *(multi years),*
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
    a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
    b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang

(principal outstanding),

c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak,
d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
e. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup,
g. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kota ke pemerintah desa, dan pemerintah Kecamatan. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Tidore Kepulauan,

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2010-2015 adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten,
2. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya,

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2010-2015 adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, dan penyertaan modal BUMD,
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman dapat diberikan apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD,
4. Pembentukan Dana Cadangan terkait dengan rencana investasi.

3.2.4 Arah Kebijakan Dana Masyarakat dan Mitra

Arah kebijakan Tahun 2010-2015 untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kota Tidore Kepulauan. Pengembangan tersebut diarahkan

melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kota Tidore Kepulauan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi Peraturan Daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kota Tidore Kepulauan,
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Kota Tidore dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati,
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal,
4. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan,
5. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),
6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur,

3.3 Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan mempertimbangkan pencapaian Pendapatan Daerah dan kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional Kota Tidore Kepulauan serta kapasitas Dinas pengelola Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan 16,73%. Hal ini dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, upaya-upaya penggalian potensi pendapatan daerah termasuk didalamnya pendayagunaan asset Kota Tidore Kepulauan masih belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal.

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan di Kota Tidore Kepulauan

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Kesehatan

Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah, sejalan dengan itu, berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan meningkatnya usia harapan hidup. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh secara proporsional dalam rangka menjamin keseimbangan jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk usia non produktif. Pembangunan kesehatan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai masalah dan tantangan pembangunan kesehatan yang dihadapi adalah masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, masih terdapatnya balita kurang gizi, masih tingginya kematian akibat penyakit terutama malarian serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum optimal dan merata. Peran dan kualitas hidup perempuan serta anak di berbagai bidang, masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak masih kurang memadai.

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Pendidikan

Permasalahan pembangunan pendidikan adalah penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunnya angka buta aksara, menurunnya kesenjangan pendidikan antara penduduk yang mampu dan kurang mampu, penduduk antar jenis kelamin, penduduk perkotaan dan perdesaan.

Dengan mencermati hasil yang telah dicapai Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan kurun waktu 5 tahun (2005-2010) pada sektor pendidikan pada berbagai indikator, baik indikator peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, maupun indikator pemerataan dan perluasan jangkauan pendidikan mengalami peningkatan yang cukup

signifikan dari tahun ke tahun. Keberhasilan pembangunan pendidikan yang telah dicapai tersebut, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah, antara lain tingginya Angka Putus Sekolah (APS) setiap jenjang pendidikan. Kondisi ini disebabkan karena menurunnya kemampuan orang tua siswa untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, terutama pada masyarakat lapisan bawah, sehingga berakibat masuknya anak sekolah pada berbagai lapangan pekerjaan. Pemerataan kesempatan pendidikan dasar maupun menengah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan efesiensi. Siswa yang terdaftar di sekolah dalam jumlah yang besar belum menjamin seluruhnya bisa belajar sampai tuntas karena sebagian putus sekolah. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran disekolah. Selain dari pada itu, faktor kualitas tenaga pengajar sangatlah mendukung. Tingkat kelayakan guru yang mengajar disesuiakan dengan kualifikasi pendidikan formalnya. Distribusi guru yang tidak merata serta pendayagunaan yang belum efisien belum menghasilkan kinerja guru yang optimal. Mutu profesi (kualifikasi dan kompetensi) guru masih dirasakan rendah, terutama disebabkan oleh penyiapan guru dan pengelolaannya belum profesional. Evaluasi kinerja guru belum ditata di dalam suatu sistem akuntabilitas publik, sehingga output pendidikan belum akuntabel dan bermutu. Sistem pembinaan karier guru perlu dibangun. Sentralisasi dalam manajemen pendidikan menyebabkan kurang berkembangnya kemampuan daerah untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pendidikan daerah masing-masing. Berbagai tahap pembinaan bahkan kebijaksanaan operasional pendidikan dilaksanakan dan dikelola oleh pusat, sementara fungsi aparat daerah hanyalah sebagai pelaksana. Sistem pengelolaan seperti ini mungkin ampuh untuk menjawab persoalan makro tetapi kurang peka terhadap persoalan mikro pada masing-maing daerah yang bervariasi satu dengan yang lainnya.

4.1.3 Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Tidore Kepuluan, dewasa ini telah menghasilkan berbagai kemajuan, namun masih diperhadapkan berbagai tantangan dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh guna lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan ke depan yang perlu mendapat perhatian

adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdampak kepada penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan antara golongan, antar wilayah dan antar sektor secara proporsional.

Keterbatasan lapangan kerja merupakan salah satu masalah pokok pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan, masalah lain dari aspek ketenagakerjaan ini juga adalah menyangkut minat masyarakat dalam membuka lapangan kerja baru. Minimnya Tenaga Kerja terlatih Kota Tidore Kepulauan masih dihadapkan dengan terbatasnya jumlah tenaga kerja yang terserap untuk berbagai sektor pembangunan di luar sektor pemerintahan. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi makro regional Kota Tidore Kepulauan masih didominasi sekor pertanian melalui sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi positif bagi pembentukan PDRB tahun 2010. Posisi pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan rata-rata per tahun yang mencapai 2,5% sebenarnya cukup baik tetapi masih jauh dari pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate, daerah tetangganya, yang mencapai 5,79 % per tahun pada tahun yang sama.

4.1.3 Permasalahan Pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi

Tantangan utama yang dihadapi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan adalah bagaimana menghasilkan lulusan pendidikan/pelatihan yang berkualitas dan mampu bersaing di sekolah unggulan dalam dan luar negeri serta di pasar kerja. Selain itu, kurangnya minat riset dan pengembangan teknologi perlu ditunjang dengan perangkat teknologi dan informasi yang lebih memadai. Partisipasi pemuda dalam pembangunan ilmu dan teknologi perlu ditingkatkan seiring dengan upaya memaksimalkan pembinaan prestasi ilmu dan teknologi.

4.1.4 Permasalahan Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor transportasi adalah pemeliharaan, peningkatan, dan penyediaan infrastruktur transportasi yang selama ini telah dikembangkan ke pusat-pusat pertumbuhan dan sentra produksi, masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Serta penataan lingkungan pengelolaan sumberdaya

air di masa yang akan datang, perlu lebih ditingkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

4.1.5 Permasalahan Pembangunan Politik

Tantangan utama di bidang politik adalah melaksanakan reformasi struktur politik, proses dan budaya politik serta kedewasaan berdemokrasi agar berjalan bersamaan dan berkelanjutan. Terutama dalam kaitanya dengan pelembagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi akan diperhadapkan pada bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa, agar akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik sekaligus sebagai proses menemukan dan mencegah penyelewengan kekuasaan.

4.1.6 Permasalahan Pembangunan Hukum Dan Keamanan Masyarakat

Pembangunan di bidang ketertiban umum dan keamanan masyarakat menghadapi tantangan yang antara lain ketersediaan jumlah aparat penegak hukum dengan jumlah penduduk, belum berimbang secara proporsional serta belum ditunjang sarana dan prasarana pengamanan yang lebih memadai, serta euphoria reformasi yang menyebabkan sebagian masyarakat cenderung melawan hukum.

Arus globalisasi dan industrialisasi akan menjadi tantangan utama pemerintah dan masyarakat Kota Tidore Kepuluan sepuluh tahun mendatang seiring dengan berkembangnya Ibu Kota provinsi di Sofifi. Dampaknya adalah permasalahan sosial seperti: menipisnya nilai budaya, kemiskinan, perubahan sikap dan perilaku, kenakalan remaja, kriminalitas, kekerasan dan penyalahgunaan NARKOBA, HIV/AIDS, perlu menjadi perhatian secara intensif melalui pembangunan mental dan spiritual.

4.1.7 Permasalahan Pembangunan Aparatur Dan Kelembagaan Masyarakat

Tantangan pembangunan hukum, aparatur dan kelembagaan masyarakat yaitu kompleksitasnya permasalahan akibat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi. Proses demokrasi yang dijalankan telah membuat masyarakat semakin sadar akan hak dan tangungjawabnya. Partisipasi masyarakat menjadi tema sentral dalam

penyelenggaraan pemerintahan dimana tingkat partisipasi masyarakat akan berpengaruh kepada kesiapan aparatur dalam menghasilkan kebijakan pembangunan secara tepat. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokrasi tersebut, perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas prima dari kinerja pemerintahan.

4.1.8 Permasalahan Pembangunan Wilayah Dan Tata Ruang

Tantangan ke depan dalam mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antara wilayah adalah mengupayakan peningkatan penyediaan jaringan prasarana yang terintegrasi, perbaikan iklim usaha produksi dan pemasaran serta kelancaran investasi. Sehingga tercipta keterkaitan ekonomi antar sektor, antar wilayah dan antar kota/desa. Selain itu tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah adalah bagaimana mendorong perkembangan desa tertinggal dan terisolir dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang belum tergali dalam rangka menciptakan kawasan-kawasan potensi sosial ekonomi baru.

4.1.9 Permasalahan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Tantangan utama pembangunan perumahan dan permukiman dilatarbelakangi oleh adanya pertambahan penduduk yang semakin meningkat yang tentunya membutuhkan tempat permukiman yang layak huni. Olehnya itu, pembangunan perumahan dan permukiman ke depan perlu diperhatikan bagaimana menciptakan tempat hunian yang sehat serta berwawasan lingkungan bagi masyarakat dalam berbagai strata kehidupan sosial ekonomi.

4.1.10 Permasalahan Pembangunan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

Tantangan dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah bagaimana menjaga dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungannya dengan daya dukung dan keseimbangan antar fungsi-fungsi kawasan. Olehnya itu, perlu dilakukan upaya-upaya pendekatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara multisektor, integratif dan komprehensif dengan tetap menjaga kelestariannya dalam rangka meningkatkan pengawasan serta pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang.

4.2 Isu Strategis

Sesuai dengan RPJP ke-2, yang diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), melalui penataan kembali kehidupan sosial yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas, perlindungan terhadap hak hidup penyandang masalah sosial, anak yatim, orang tua jompo, penyandang cacat, korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan psikotropika, tuna karya, tuna wisma dll) sebagai wujud pelaksanaan masyarakat yang agamais (religius).

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan dokter masuk desa, optimalisasi fungsi puskesmas, pengadaan rumah sakit rujukan, penyediaan obat-obatan dan subsidi kesehatan. Penurunan tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan dilakukan dengan penyuluhan kesehatan ibu dan anak yang menjangkau desa terpencil, penyuluhan gizi dan keluarga berencana serta kampanye hidup sehat.

Efektifitas dan efisiensi pengeluaran pembiayaan pembangunan dilakukan dengan memangkas pos-pos pengeluaran yang tidak perlu. Penggunaan anggaran bagi pelaksanaan program SKPD dan unit kerja terkecil dilaksanakan seefisien mungkin dalam mengurangi tingkat kebocoran anggaran. Diantaranya penggunaan anggaran bagi perjalanan dinas dalam rangka konsolidasi program dilakukan melalui sistem pelaporan hasil koordinasi dan konsultasi yang transparan dan akuntabel.

Berlandaskan arahan RPJP Kota Tidore Kepulauan tahun 2005-2025 tahap ke-2, maka penyusunan isu strategis dalam Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore 2010-2015 disesuaikan dengan pandangan strategis sebagaimana yang tertuang dalam RPJP, yang selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian dirumuskan isu strategis, yang diidentifikasikan dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan 2005-20025, diataranya: Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan kehidupan sosial yang damai, mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing, Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis, Mewujudkan masyarakat berperadaban (*civility, al-madaniyyah*) dan Mewujudkan pusat pemerintahan yang efektif,
2. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana-prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan kondisinya di masa datang,
3. Isu strategis menurut aspirasi masyarakat melalui kegiatan survey,
4. Isu strategis menurut pendapat para pakar dan tokoh masyarakat atas kondisi yang mereka rasakan saat ini dan kemungkinannya di masa datang,

Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 ini disusun berdasarkan kompilasi dari empat sumber di atas, dari analisis atas situasi dan kondisi serta persepsi masyarakat, tokoh dan para pakar. Dari sejumlah isu dan permasalahan yang diperoleh maka diperoleh isu strategis dengan kriteria berikut ini:

1. Cakupan masalah yang luas,
2. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif,
3. Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal,
4. Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan,
5. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu,
6. Permasalahan dalam jangka menengah diarahkan untuk dapat ditangani pada masa mendatang,

Berdasarkan hasil analisis dari data serta persepsi masyarakat, tokoh dan para pakar, maka dapat disusun kelompok masalah dan makna dari isu strategis dalam RPJMD Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,

2. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam dan teknologi,
3. Pengembangan pusat pertumbuhan baru melalui pendekatan kawasan terpadu mandiri,
4. Recovery instratruktur ekonomi sebagai pengembangan ekonomi baru,
5. Memaksimalkan Kapasitas sumber daya Aparatur dalam pelayanan dan pelaksanaan public,
6. Peningkatan koordinasi, sinegritas, sinkronisasi dan harmonisasi kerjasama antara pemerintah, swasta dan Masyarakat,
7. Peningkatan kompetensi dan kemampuan teknis dalam manajemen pengelolaan keuangan pemerintah,
8. Sinegritas modal sosial masyarakat bagi pembangunan,
9. Penguatan kapasitas kelembangaan dan SDM di desa, kelurahan dan kecamatan dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan,
10. Pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
11. Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup,
12. Peningkatan prioritas pembangunan di wilayah pedesaan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,
13. Perkembangan tuntutan pemekaran desa, kelurahan, kecamatan dan pengembangan kota,

BAB IX
PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Dalam pelaksanaan program, pemerintah memiliki keterbatasan berupan anggaran yang hanya dibatasi 1 tahun, dengan demikian ada beberapa program yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang (*multiyears*) seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur kunci. Program-program itu memiliki kebutuhan dana yang cukup besar sehingga harus dilakukan beberapa tahap. Selain itu, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka untuk menghindari kekosongan dokumen perencanaan/RPJMD pada masa transisi peralihan periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka RPJP menjadi pedoman sementara bagi pemerintah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pamong (*governance*) yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (*overlapping)* pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pamong yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya.

9.3 Pedoman dalam menyusun Renstra SKPD

Dokumen RPJM Daerah ini, yang disusun mulai Tahun 2010-2015 merupakan penerjemahan Visi dan Misi Walikota terpilih. Dengan demikian setelah dokumen ini tersusun dan dikeluarkan Peraturan Walikota, maka dokumen ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan pemerintahan daerah. Walaupun demikian perlu ditegaskan disini, bahwa satuan kerja yang ada diharapkan bekerja dengan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi.

Dengan SKPD yang mengacu terus kepada RPJM Daerah maka tata pamong yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta.

9.4 Pedoman dalam penyusunan RKPD

Sebagaimana dijelaskan di atas, RPJM Daerah sebagai pedoman untuk penyusunan program-program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang diusulkan di dalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJM Daerah. Dengan kata lain, penetapan prioritas program dan kegiatan akan muncul dalam RKPD yang diusulkan baik oleh eksekutif dan legislatif. Dalam RPJM Daerah, program-program yang ditawarkan memiliki dimensi umum dan masih perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan riil. Setelah kegiatan riil dijadwalkan dalam RKPD, maka pembiayaan dapat disusun. Dengan menggunakan prinsip "*money follows function*" maka kegiatan-kegiatan yang diusulkan akan memunculkan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang ada saat ini masih bersumber pada pemerintah (APBD). Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD yang terbatas, berdampak pada pilihan-pilihan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu dimasa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat (*public-private partnership*), perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin banyaknya alternative sumber-sumber pembiayaan, maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya.

9.5 Peran Stakeholders

Sebagaimana dijelaskan di atas, RPJM Daerah ini disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik. Dimulai dengan pembentukan pokja (kelompok kerja) yang melibatkan perwakilan antar dinas di lingkungan pemerintah Kota dengan koordinasi oleh Bappeda Kota Tidore Kepulauan. Setelah itu, hasil kerjanya ini disosialisasikan kepada stakeholers baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat. Setelah adanya masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar untuk penajaman konsep.

Setelah itu, dokumen RPJM Daerah ini disosialisasikan kembali kepada masyarakat (*stakeholders*) dan masukan masyarakat di terjemahkan kembali dalam program-program yang diusulkan. Dengan melalui beberapa proses tersebut, diharapkan terjadi proses penguatan *stakeholders* tersebut. *Stakeholders* yang kuat, akan mendorong proses penyusunan program yang transparan, munculnya kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program (*safe guarding*) dari mereka. Dengan demikian, *stakeholders* yang kuat akan mendorong

demokratisasi dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya dokumen RPJM Daerah ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM Daerah ini menunjukkan indikator-indikator yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan kepala daerah. Sebagaimana dijelaskan di atas, RPJMD ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD.

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi Kota Tidore Kepulauan 2010-2015

"Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan Yang Religius, Maju, Adil, dan Sejahtera"

Arah visi tersebut adalah menerangkan Kota Tidore Kepulauan sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Kota Tidore khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. Kota yang religius, maju, adil, dan sejahtera, 4 kata tersebut memiliki dimensi:

a. **Religius,** memiliki dua dimensi yaitu:
   1. Terwujudnya pemahaman pengamalan dan etos karja dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing pemeluk dan toleran antar umat beragama,
   2. Terwujdnya Masyarakat modern yang berbudaya yaitu masyarakat yang senantiasa berfikir dan bertindak positif, terbuka menerima nilai-nilai baru, berpandangan luas, berorientasi ke masa depan dan toleran terhadap perbedaan serta tidak primordial dan tetap berdasarkan pada nilai-nilai lokal,

b. **Maju,** memiliki dua dimensi yaitu:
   1. Terwujudnya kuantitas dan kualitas SDM dan daya saing dalam mengelolah sumber daya alam yang di ukur dari jumalh penduduk dan indeks pendidikan,
   2. Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan menjadi pusat bagi daerah-daerah di sekelilingnya; pusat pendidikan, pariwisata, perdagangan dan pelayanan kesehatan,

c. **Adil,** memiliki empat dimensi yaitu:
   1. Terwujudnya distribusi sumber daya ekonomi secara marata, sebagai upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja dan pengurangan penganguran,

2. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam perwujudan jaringan aspirasi masyarakat,
3. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis diimplementasikan dalam kebebasan penyampaian aspirasi, tingkat pastisipasi dalam pemilihan umum serta pemeliharaan situasi keamanan yang kondusif,
4. Terwujudnya penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan dalam segala aspek kehidupan,

d. Sejahtera, memiliki dua deminsi yaitu:

1. Terpenuhinya hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses pendidikan, akses kesehatan dan parioritas daya beli yang merupakan inti dari tujuan pembangunan secara umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*Society welfare*), yang sesuai dengan indeks ekonomi dan indeks kesehatan,
2. Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan ada imbas peningkatan aktivitas ekonomi baik secara langsung atau sebagai dampak *multiplier effect*, sehingga ada peningkatan produktivitas di segala sektor yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan,

5.2 Misi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2015

Untuk mewujudkan visi Kota Tidore Kepuluan tersebut, maka dijabarkan dalam 10 misi yang yang disesuaikan dengan Misi Tahap II dalam RPJPD Kota Tidore 2005-2025 dan integrasi dari menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Tidore Kepulauan:

1. Meningkatkan Kualitas beragama,
2. Melestarikan dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan adat,
3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat (*live skill*),
4. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal dan layanan kesehatan yang berkualitas,
5. Meningkatkan pembiayaan pembangunan dan optimalisasi peng. Sumber-sumber pendapatan daerah,

6. Pemberdayaan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat,
7. Penciptaan lapangan kerja,
8. Menyelenggaraan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab serta mewujudkan kinerja pelayanan pemerintahan yang terbaik tercepat, terukur, akuntabel dan transparansi,
9. Menegakan supermasi hukum dan terwujudnya Kota Tidore yang bersih dan bebas KKN,
10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup,

1.3 Tujuan dan Sasaran

Misi-1 : Peningkatan Kualitas beragama.
Tujuan : Memantapkan Peningkatan kualitas keimanan Warga Kota

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas keimanan dan sikap toleransi antar umat beragama,
2. Meningkatnya peran organisasi keagamaan, pemuda dan kaum Ibu,
3. Meningkatnya promosi kegiatan keagamaan dalam setiap even lokal maupun nasional,
4. Meningkatnya kebijakan dalam rangka mengantisipasi konflik antar umat beragaman,
5. Meningkatnya pengawasan kepada aktifitas keagamaan untuk menghindari ajaran-ajaran sesat yang tumbuh dimasyarakat,
6. Meningkatnya kualitas hidup melalui keimanan dan ketaqwaan,

Misi-2 : Pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan adat.
Tujuan : Teraktualisasi sinergitas pelestarian budaya lokal antar pemerintah pelaku daya dan masyarakat

Sasaran :

1. Nilai-nilai budaya lokal yang sesuai dengan kehidupan masyarakat,
2. Meningkatkan kelompok sanggar-sanggar kesenian daerah,
3. Meningkatkan keterwakilan duta kesenian dan budaya dalam even nasional sebagai suatu eksistensi budaya lokal,

4. meningkatkan inovasi budaya dan adat untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing,
5. Meningkatkan peran pemuda dalam pelestarian budaya lokal,

Misi-3 : Peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat (*live skill*).
Tujuan : Mewujudkan kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan teknologi dalam rangka mendorong usaha ekonomi masyarakat

Sasaran:
1. Peningkatan jumlah tingkat penguasaan teknologi dan keterampilan masyarakat,
2. Peningkatan kemampuan dan daya saing masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan melakukan kegiatan usaha,

Misi-4 : Peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan layanan kesehatan yang berkualitas.
Tujuan: Memantapkan SDM melalui pendidikan dan Kesehatan Warga Kota Tidore yang berkualitas

Sasaran:
1. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan menekan Angka Putus Sekolah (APS),
2. Meningkatnya angka melek huruf,
3. Meningkatnya Jumlah sekolah unggulan,
4. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau,
5. Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum,
6. Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan,
7. Meningkatnya pengawasan komoditas produk-produk pangan,
8. Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah penduduk,
9. Meningkatnya akses keluarga terhadap sanitasi dan air bersih,
10. Meningkatnya cakupan imunisasi dan prevalensi gizi pada balita,
11. Menurunnya angka kematian bayi dan ibu hamil,

Misi-5 : Peningkatan pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pengembangan Sumber-sumber pendapatan daerah.
Tujuan : Mewujudkan anggaran pemerintahan yang optimal

Sasaran :

1. Meningkatkan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel,
2. Meningkatkan sinergitas pengunaaan anggaran APBN dan APBD,
3. Berkembangnya instrument pembiyaan pembangunan non-konversional,
4. Mewujudkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembiyaan pembangunan kota,
5. Meningkatnya PDRB per kapita,
6. Meningkatnya PAD pengelolaan melalui sektor unggulan,
7. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan,
8. Kemudahan bagi investor dalam hal perizinan dan penyediaan lahan investasi,
9. Tersedia data dan informasi yang komperehensif dan akurat tentang potensi unggulan,

Misi-6 : Pemberdayaan masyarakat dan pengunaan teknologi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
Tujuan : Terciptanya Pemberdayaan Masyarakat dalam penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Sasaran:

1. Meningkatnya Pengunaan teknologi dalam menunjang usaha masyarakat yang kompetitif,
2. Terbentuknya kelembagaan masyarakat pelaku ekonomi seperti kooperasi, PKM dan jenis usaha lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,
3. Meningkatnya perluasaan pangsa pasar komoditi-komoditi unggulan dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat,
4. Meningkatnya manajemen kewirausahaan masyarakat sehingga mendukung pengembangan ekonomi local,
5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara optimal, dalam rangka pengembangan usaha yang potensial dan kompetitif dengan tetap mengutamakan unsur keberlanjutan SDA yang tersedia,

Misi-7 : Penciptaan lapangan kerja
Tujuan : Mewujudkan penurunan angka kemiskinan

Sasaran :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan tingkat kemiskinan,
2. Meningkatkan investasi dalam dan luar negeri untuk membuka lapangan kerja,
3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domesetik dan asin,

Misi-8 : Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab serta mewujudkan kinerja pelayanan pemerintahan yang terbaik tercepat, terukur, akuntabel dan transparansi,
Tujuan : Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bertangungjawab dan akuntabel

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat,
2. Pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah,
3. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang professional dan terukur,
4. Penyesuain jumlah kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah,
5. Terlaksananya evaluasi kenerja pegawai yang objektif,
6. Meningkatnya etos kerja sesui tupoksi untuk menunjang pelayanan masyarakat,
7. Terciptanya sistem kepegawaian yang ideal dan teruji sehingga menjamin pelaksanaan penjenjangan karir pegawai secara sehat,
8. Terciptanya penghargaan bagi aparatur yang berdedikasi tinggi,

Misi-9 : Penegakan supermasi Hukum dan terwujudnya Kota Tidore yang bersih dan bebas KKN.
Tujuan : Mewujudkan supremasi hukum demi mewujudkan kota Tidore yang bersih dari KKN

Sasaran :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan yang efektif dan dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang efektif, aplikatif dan akuntabel,
2. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat,

3. Meningkatnya professionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel,
4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi,
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis,
6. Meningkatnya transparansi pengelolaan pemerintahan,
7. Meningkatnya ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan stabilitas keamanan daerah,
8. Meningkatkan tersosialisasinya produk hukum nasional dan hukum daerah,

Misi-10 : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup,
Tujuan : Mewujudkan sarana dan prasarana lingkungan yang memenuhi standart teknis/standar pelayanan minimal (SPM) serta Memantapkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran :
1. Mewujudkan kualitas udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan,
2. Menjamin tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam),
3. Tersedianya tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan dan tersedianya sistem drainase kota yang tertata.
4. Mewujudkan pengelolaan limbah padat yang efektif dan bernilai ekonomi,
5. Mewujudkan ruang Kota yang aman, dan tertatanya ruang terbuka publik yang nyaman, produktif dan berkelanjutan,
6. Tersedianya lahan pemakaman sesuai kebutuhan,
7. Terkendalinya pemanfaatan ruang dan meningkatnya penghijauan swadaya,
8. Berkembangnya system prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kita,
9. Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian bencana alam (gempa, longsor),
10. Penanggulangan infrastruktur pasca bencana,

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi Pembangunan Pemerintahan

Dalam rangka mencapai Visi Misi Kota Tidore Kepulauan yang diharapkan, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Strategi pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan terorganisir secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui evaluasi yang sistematis. Dalam hal ini strategi yang dimaksud akan menjadi kebijakan, program dan kegiatan. Strategi pembangunan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 -2015 difokuskan pada 7 bidang pembangunan sebagai berikut:

6.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi diorientasikan pada pengembangan ekonomi lokal yang berbasis kerakyatan, peningkatan daya saing dan kualitas produk komoditi unggulan daerah, perluasan jaringan bisnis, memperkuat kedudukan fiskal dan moneter dalam mengotimalkan potesi pasar regional maupun global dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi:

1. Pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar serta jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku,
2. Penciptaan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui regulasi perisinan yang bersifat transparan,
3. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar efisien, produktif dan berdaya saing,
4. Pengembangan dan penelitian potensi ekonomi daerah yang mengarah pada kemandirian ekonomi lokal,

5. Pelaksanaan pendataan ulang, verifikasi dan pengembangan aset pemerintah daerah agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat,
6. Pembinaan dan pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat agar terwujud masyarakat yang mandiri dan kompetitif,
7. Penataan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi Badan Usaha yang profesional, efisien dan transparan,

6.1.2 Pembangunan Sosial Budaya

Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya diorientasikan pada penciptaan tatanan masyarakat yang religius, maju dan menuju kehidupan masyarakat sejatera.

Strategi:

1. Peningkatan kualitas pendidikan agama yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana pada setiap jenjang pendidikan,
2. Peningkatan peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan masyarakat,
3. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang merata bagi masyarakat, demi menuju masyarakat kota Tidore yang cerdas dan kompetitif, melalui penyediaan tenaga pendidik yang terampil, serta ketersediaan sarana pendidikan yang layak,
4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan secara optimal melalui penyediaan tenaga terdidik dan terampil dalam menangani kesehatan, penyediaan obat-obat yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat,
5. Peningkatan mutu pelayanan lembaga-lembaga kesehatan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana,
6. Pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal penanganan pengawasan makanan dan minuman berbahaya bagi kesehatan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya,
7. Pembinaan dan pengembangan kemampuan lembaga dalam hal keamanan, keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku,

8. Peningkatan administrasi kependudukan dan manajemen pengelolaan kependudukan,
9. Pengembangan dan pembinaan nilai-nilai seni dan budaya daerah warisan masa lalu sebagai wahana apresiasi kehidupan masyarakat, yang disesuaikan dengan moral etika dan estetika bangsa,
10. Pengembangan dan pemeliharaan seni budaya daerah sebagai daya tarik wisata melalui pembinaan yang komperehensif dan berkesinambungan terhadap lembaga dan organisasi seni budaya lokal,
11. Pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu secara lintas sektoral, bersifat partisipatoris dan berkelanjutan,
12. Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam semua bidang kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan,
13. Penciptaan kualitas generasi muda yang mandiri, berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif,
14. Menumbuhkembangkan dan pembinaan budaya olahraga sejak dini melalui pendidikan olahraga baik di sekolah maupun dalam masyarakat,

6.1.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber daya manusia diorientasikan pada peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mewujudan kemandirian serta daya saing masyarakat. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Strategi:

1. Peningkatan kualitas aparatur untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah,
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur dengan pelatihan dan kursus-kursus, yang susuai dengan kebutuhan daerah,
3. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan baik formal maupun informal bagi seluruh masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun secara sistematis dan komprehensif,

4. Pembaharuan sistem pendidikan melalui diversifikasi pendidikan kejuruan, serta memasukkan muatan lokal pada kurikulum yang tersedia sesuai dengan kepentingan daerah dan kebutuhan pasar kerja,
5. Pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan sebagai tempat penyiapan tenaga-tenaga terampil yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur,
6. Pengawasan mutu pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang,

6.1.4 Pembangunan Penataan Wilayah

Pembangunan Penataan Wilayah diorientasikan pada peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk menciptakan ruang dan lingkungan kehidupan yang lebih layak.

Strategi :

1. Peningkatan peran dan fungsi Kota Tidore Kepulauan sebagai kota relegi yang berorientasi sebagai pusat jasa dan perdagangan melalui penataan tata ruang wilayah untuk meningkatkan peran sentra-sentra ekonomi,
2. Peningkatan infrastruktur secara merata dengan penekanan pada peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang efektif dan efisien,
3. Pengembangan kebijakan pemanfaatan lahan yang legal formal berdasarkan pada kepentingan penataan ruang, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,
4. Peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang ada,
5. Peningkataan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang sesuai dengan teknologi yang ramah lingkungan,
6. Pengawasan terhadap pemanfaatan potensi dan kerusakan kondisi lingkungan,
7.

6.1.5 Keuangan Daerah

Pembangunan Keuangan daerah adalah mengoptimalkan pendapatan keuangan daerah untuk pembangunan daerah.

Strategi:

1. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan,
2. Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan oleh swasta,
3. Peningkataan PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah secara rasional dan memperhatikan kemampuan masyarakat,

6.1.6 Pembangunan Aparatur Pemerintahan.

Pembangunan Pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujukan pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah (pusat, propinsi,kabuapten dan kota), perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Strategi dan kebijakan dalam program pembangunan sebagai berikut:

Strategi:

1. Restrukturisasi organisasi dan penataan kembali mekanisme kerja pemerintah dengan peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelengaraan kewenangan urusan pemerintahan,
2. Peningkatan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam hal kerjasama daerah,
3. Penyelenggaraan pembinaan karir aparatur berdasarkan kesetaraan gender, profesionalisme, prestasi dan pendidikan,
4. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui penciptaan suasana yang kondusif dan pemberian imbalan (*reward*) yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah,
5. Menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis dan meningkatkan pendidikan politik dalam masyarakat,
6. Penciptaan pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal, fungsional dan masyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah,

7. Peningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab,

6.1.7 Peningkatan kualitas kehidupan politik dan penegakan hukum

Pembangunan politik dan penegakan hukum akan diarahkan pada perwujudan demokarsi.

Strategi:

1. Peningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Perwujudan pemahaman demokrasi yang kuat bagi masyarakat,
3. Menekankan masalah yang layak ditangani dalam jangka menengah serta mempersiapkan landasan penyelesaian permasalahan dalam jangka panjang,

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka kebijakan pembagunan daerah Kota Tidore Kepulauan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Peningkatan Kualitas beragama:

Arah Kebijakan:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas keimanan kepada Tuhan YME,
2. Terwujudnya peningkatan kerukunan antar umat beragaman yang toleran sebagai perwujudan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. Terciptanya masyarakat modern yang berwawasan luas dan global dengan tetap menjunjung nilai-nilai budaya lokal,
4. Pengembangan peningkatan fungsi tempat ibadah sebagai tempat meningkatkan keimanan dan moral,

Misi-2 : Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya dan Adat:

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai budaya lokal yang sesuai dengan kekinian dalam tata kehidupan masyarakat, terutama generasi muda,

2. Pembinaan seni budaya daerah dalam menunjang pariwisata,
3. Pengembangan kelompok-kelompok karang taruna/generasi muda,
4. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan,
5. Pembinaan secara komprehensif kelompok multietnis dalam menunjang Tidore sebagai Kota religi,
6. Pengembangan LSM yang berorientasi pada pembangunan dan lingkungan kota,
7. Peningkatan peran lembaga dakwah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama,
8. Pembinaan anak jalanan sehingga memiliki kesempatan dalam berkreasi, produktif, dan berdayaguna dimasa depan,
9. Peningkatan peran media dalam penyalahgunaan informasi pembangunan,

Misi-3 : Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat (*live skill*):

Arah Kebijakan:

1. Terwujudnya penguasaan teknologi masyarakat sehingga memiliki kemapuan dan keterampilan,
2. Penguatan institusi masyarakat dalam membangun modal sosial, perilaku dan kebudayaan melalui peran serta masyarakat sehingga terbentuk solidaritas masyarakat yang kokoh dan dinamis,
3. Mewujudkan kecerdasan masyarakat, kemampuan dan daya saing dalam memperoleh pekerjaan serta melakukan kegiatan usaha,
4. Tumbuhnya usaha kecil menegah yang memiliki peluang pasar lokal maupun regional,

Misi-4 : Peningkatan SDM melalui Pendidikan Formal dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas:

Arah Kebijakan:

1. Pengembangan pendidikan formal dan informasi dalam semua strata pendidikan,
2. Peningkatan kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya pencegahan dan penanganan HIV dan narkoba terutama dikalangan generasi muda,

3. Peningkatan lingkungan hidup diperkelolaan dan disiplin hidup diperkotaan,
4. Peningkatan peran swasta dalam pendidikan,
5. Penguasaan teknologi informasi bagi masyarakat kota,
6. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat sehat dan memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,
7. Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan,
8. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat memiliki fisik dan raga yang sehat dan memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,

Misi-5 :Peningkatan Pembiayaan Pembangunan dan Optimalisasi Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah:

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan dan menggali sumber pendapatan daerah berdasarkan azas proporsionalitas, adil dan merata,
2. Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan sebagai bagian dari deregulasi dalam pengembangan pelayanan publik,
3. Pemanfaatan dana secara efisien dan produktif yang didasarkan pada pendekatan hasil/output dengan dilandasi azaz manfaat,
4. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah kota untuk meningkatkan PAD dan peningkatan pelayanan publik,
5. Pengelolaan keuangan secara transparan dalam meningkatkan akuntaniliutas publik,

Misi-6 : Pemberdayaan Masyarakat dan Pengunaan Teknologi dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat:

Arah Kebijakan:

1. Pengembangan kewirausahaan dengan membangun kompetensi dari kemampuan daya saing yang kreatif,

2. Perbaikan infrastruktur ekonomi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam mengembangkan ketahanan pangan kota,
3. Pendukungan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja,
4. Pendukungan perubahan pola konsumsi masyarakat melalui diverifikasi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan kota,
5. Penataan Struktur ekonomi perkotaan melalui penataan ruang aktivitas maupun pola konsumsi, distribusi dan produksi yang baik,
6. Pengembangan kemitraan usaha koperasi/usaha kecil, menengah dan besar dalam menunjang pengembangan ekonomi kreatif,
7. Penguatan promosi daerah dalam menarik wisatawan dan investasi dalam bidang pariwisata,

Misi-7 : Penciptaan Lapangan Kerja:

Arah Kebijakan:

1. Penataan dan optimalisasi prosedur investasi dalam meningkatkan kesempatan kerja di melalui pelayanan satu pintu,
2. Penataan pedagang kaki lima dan meningkatkan kemitraan dengan sentra sentra produk lokal dalam mengembangkan industri kreatif tradisional,
3. Meningkatnya investasi dalam dan luar negeri yang berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat,
4. Tersedia data dan informasi yang komperehensif dan akurat tentang potensi investasi, yang berguna bagi investor dalam memutuskan bidang investasi yang akan dipilih,
5. Pemberian kemudahan bagi investor dalam hal perizinan dan penyediaan lahan investasi sehingga menjadi suatu nilai tambah bagi Kota Tidore Kepulauan dibandingkan daerah lainnya,

Misi-8 :Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas Nyata dan Bertanggungjawab serta Mewujudkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan yang Terbaik Tercepat, Terukur, Akuntabel dan Transparansi:

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan pemerintahan yang *Good Government* disertai prinsip efektif, efisien, akuntabel dan transparan,
2. Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan melalui desentralisasi kebijakan pemerintahan kota,
3. Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah,
4. Terciptanya instrumen penilaian kinerja dan kompetensi jabatan yang implementatif,
5. Terciptanya sistem kepegawaian yang ideal dan teruji sehingga menjamin pelaksanaan penjenjangan karir pegawai secara sehat,
6. Peningkatan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menciptakan kondisi nyaman, ramah dan produktif,
7. Pengembangan manajemen kota efisien, produktif dan berdayaguna,
8. Peningkatan fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal sehingga tercipta suatu mekanisme birokrasi yang sehat dan terpercaya,
9. Pengembangan system informasi dalam manajemen pemerintahan yang dapat memonitor permasalahan kota sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah Kota,

Misi-9 : Penegakkan Supermasi Hukum dan Terwujudnya Kota Tidore yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme:

Arah Kebijakan:

1. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dengan peningkatan SDM aparatur, serta penegakan supremasi hukum dalam rangka menjaga kewibawaan pemerintahan,
2. Tersedia produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk menunjang pembangunan daerah,
3. Tercipta kesadaran dan komitmen masyarakat untuk proaktif dan tanggap berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

4. Aparatur pemerintah mendorong dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan,

Misi-10: Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup:

Arah Kebijakan:

1. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,
2. Tersedianya pendataan potensi sumber daya alam,
3. Mengurangi kerusakan lingkungan pesisir dan laut dan kerusakan hutan,
4. Pengelolaan tata ruang secara konsisten, efisien, produktif dan dinamis sesuai dengan RT/RW kota,
5. Pengelolaan lingkungan yang sehat, bersih, hijau dan berbunga,
6. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan sekunder,
7. Penghijauan perbaikan dan penambahan taman kota dan ruang terbuka untuk publik serta perbaikan dan pemanfaatan daerah aliran sungai yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan,
8. Pelaksanaan program *urban renewal* dan *urban redevelopment* dalam meningkatkan pelayanan sektor jasa,

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum

Untuk mewujudkan kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan RPJMD 2010 - 2015 maka perlu pemantapan pelaksanaan pemerintahan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur kepemerintahan yang berbasis pada teknologi, kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan ber-investasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional, pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keimanan dan ketaqwaan, pengembangan olahraga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperbesar akses bagi warga masyarakat kurang mampu. Dalam rangka mewujudkan kenerja pemerintahan maka perlu ditetapkan kebijakan umum diantaranya:

7.1.1 Kebijakan Pelayanan umum

Kebijakan pelayanan umum diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan didukung kelembagaan yang efisien dan efektif serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan yang perlu diwujudkan adalah**:**

a. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam *one stop services* kepada masyarakat sesuai dengan SPM,
b. Terlaksananya mutu pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasi pelayanan,
c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan umum di semua jenjang sampai di tingkat kelurahan/desa, meningkatnya efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat kelurahan,
d. Membentuk Kantor Pelayanan Terpadu dengan mengubah paradigma *one service stop* menjadi *one stop service* dan penerapan SPM yang dilengkapi

dengan *client charter* Sebagai gambaran : Pelayanan Administrasi kependudukan yang dikelola Dispenduk dan Capil,

7.1.2 Kebijakan Kinerja Politik Lokal

Kebijakan pembangunan politik lokal diarahkan pada upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat.

Langkah-langkah yang ditempuh :

a. Menjaga iklim kondusif Kota Tidore Kepulauan senantiasa terjaga,
b. Meminimalisasi kejadian kerusuhan antar kampung, kerusuhan SARA dan tawuran remaja,
c. Meningkatkan penanganan masalah ketentraman dan ketertiban serta bencana,
d. Mengurangi angka kerugian dan meningkatnya aset yang dapat diselamatkan akibat kebakaran dan bencana lainnya,
e. Mewujudkan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat,
f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
g. Mendukung terwujudnya penegakan hukum dan HAM,

7.1.3 Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan ekonomi Pembangunan yang dilaksanakan di daerah secara umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Langkah-langkah yang dilakukan:

a. Pengembangan produk unggulan,
b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan potensi sumber daya perdagangan dan jasa,
c. Peningkatan ekspor dan pengembangan regulasi usaha yang mendukung iklim berinvestasi.
d. Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan jasa,

e. Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang,

7.2 Program Prioritas

Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Walikota Tidore Kepulauan 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan agenda prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalah lain. Secara umum untuk tahun 2010-2015 akan dilakukan berbagai macam program pembangunan. Dengan mempertahankan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan kampanye Walikota, maka disusun 7 (tujuh) Agenda Prioritas untuk Tahun 2010-2015. Adapun 7 (tujuh) bantuan Walikota untuk Pendidikan*;*

1. Tidore **Cerdas dan Kompetitif**, melalui Kebijakan Walikota untuk Pendidikan*,*
2. Tidore **Sehat**, melalui Kebijakan Walikota untuk Kesehatan*,*
3. Tidore **Sejatera**, dengan :
   a. Kebijakan Walikota untuk Kemakmuran,
   b. Kebijakan Walikota untuk Ketahanan Pangan,
   c. Kebijakan Walikota untuk Penduduk Lanjut Usia melalui,
4. Tidore **Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan,** melalui gerakan:
   a. Penghijauan dan Hemat Pengunaan Air,
   b. Jumat Bersih,
   c. Penanaman Sejuta Pohon,
   d. Udara Bersih,
   e. Gerakan Pembibitan, Penanaman,
5. Tidore **Kota Seni dan Budaya,**
6. Tidore **Berprestasi,**
7. Tidore **Agamis**,

Bersamaan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas tersebut dilakukan juga upaya peningkatan kinerja aparat menuju *Good Governance* dengan melajutkan tahapan **Reformasi Birokrasi** yang akan dilaksanakan melekat pada pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda prioritas tersebut. Reformasi birokrasi dimaksud adalah upaya yang sistematis, terpadu dan konferhensif yang ditunjukan untuk merealisasikan tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance)* untuk melakukan perubahan pola pikir (*Mind Setting*), budaya (*Cultural Setting*) dan peningkatan

kopetensi dan profesionalisme aparatur melaui penataan aparatur dan manajemen pemerintah.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi mutlak harus dilaksanakan pada setiap peranan melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Reformasi yang dilakukan merupakan perubahan tatanan yang lebih baik bukan perubahan secara parsial. Dengan demikian tidak semua perubahan dapat dikategorikan sebagai reformasi. Kriteria reformasi hanya dapat disandangkan apabila terjadi perubahan sistematis dan terencana *(sistematic and planned change)* yang diarahkan untuk melakukan transformasi secara mendasar dengan *outcomes* yang lebih baik. Untuk itu tahapan pementapan ini dibagi menjadi beberapa tahapan rinci setiap tahun, yaitu :

1. Tahun 2011-2012: Restorasi dilakukan dengan cara penegakan ketertiban membangun dan meningkatkan infrastruktur ekonomi serta membendung modal keluar (*capital fly*)
2. Tahun 2012-2013: Pertumbuhan dilakukan dengan cara peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan teks rasio, penurunan angka penganguran <10%
3. Tahun 2013-2015: Peningkatan kapasitas Daerah yang dilakukan dengan cara peningkatan produkstifitas dan daya saing daerah, memperkuat akses antar daerah melepaskan ketergantungan ekonomi pada daerah sekitar.

Untuk mewujudkan program prioritas, maka agenda strategis birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan meliputi :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
2. Penataan Kelembagaan (*Institutional reform*)
3. Penerapan Pola Pelayanan Satu Pintu.
4. Optimalisasi Potensi Pendapatan.
5. Peningkatan Investasi.
6. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*E-Government*).

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi ini adalah terciptanya birokrasi bermartabat di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Birokrasi bermartabat adalah sosok birokrasi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: Religius, Maju Adil dan Sejatera yang tujuannya adalah

Kota Tidore Kepulauan mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, karena birokrasi yang memahami dan menaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah.

7.3 Program Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan pembagian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dan lintas SKPD. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spatial diterapkan untuk kebijakan/program lintas SKPD.

1. **Program SKPD:** Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD yang menjadi tanggung jawab langsung SKPD, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program SKPD ini lebih mudah, khususnya didalam pengorganisasiannya. Hal ini mengingat program SKPD ini hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.
2. **Program Lintas SKPD:** Program ini adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD, program ini sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (*job description*) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan.
3. **Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah:** Dalam program kewilayahan ini dilakukan pada program-progam yang bukan hanya berbasis satuan kerja yang ada, tetapi bisa lintas satuan kerja dan wilayah. Penanganan air bersih, sampah, transportasi, penanggulangan banjir merupakan isu yang harus ditangani secara wilayah. Jika hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral maka, problematika yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Program

kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus terus melakukan kerjasama dengan daerah lain (*inter-regional network*). Dengan memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan pelayanan publik (sampah, air bersih, jalan, energi) semakin baik. Di bawah ini diuraikan program berupa kebijakan yang ada pada dokumen RPJMD ini. Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu SKPD, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas SKPD. Untuk aspek perwilayahan, program-program lintas sektoral (lintas SKPD) akan lebih bermanfaat dari pada program-program SKPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

4. **Program RPJM :** Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Tidore Kepulauan 2010-2015 maka ditetapkan program-program RPJM sebagai pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Misi-1: Peningkatan Kualitas Beragama

Program:

1. Program pengembangan nilai-nilai agama,
2. Program peningkatan pelayanan dan kualitas kehidupan beragama,
3. Program bantuan sarana dan prasarana keagamaan,
4. Program peningkatan kerukunan umat beragama,

Misi-2: Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya dan Adat

Program:

1. Program pengembangan nilai-nilai budaya,
2. Program pengelolaan kekayaan budaya dan keragaman budaya,
3. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya,

Misi-3: Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat (*live skills*)

Program:

1. Program penguasaan teknologi sebagai penunjang kemampuan dan keterampilan masyarakat.
2. Program pendidikan non formal,
3. Program penguatan kewirausahan pemuda,
4. Program penguatan kegiatan usaha ekonomi yang berdaya saing,

Misi-4: Peningkatan SDM melalui Pendidikan Formal dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas

Program:

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan

1. Program pendidikan anak usia dini (PAUD),
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,
3. Program pendidikan menengah,
4. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,
5. Program pendidikan luar sekolah (PLS),
6. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik,
7. Program manajemen pelayanan pendidikan,
8. Program peningkatan SDM perpustakaan daerah pengembangan budaya baca,
9. Program peningkatan sarana dan prasarana dan perbaikan sistem administrasi perpustakaan/kearsipan,

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1. Program upaya kesehatan masyarakat,
2. Program obat dan perbekalan kesehatan,
3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular,
4. Program lingkungan sehat dan promosi kesehatan,
5. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin,
6. Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,
7. Program pengawasan obat dan makanan,
8. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak,

c. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

1. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda,
2. Program pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga,
3. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga,

d. Penanganan Kependudukan

1. Program keluarga berencana,
2. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga,
3. Program penguatan kelembagaan dan jaringan KB,
4. Program penataan administrasi kependudukan,
5. Program kesehatan reproduksi remaja,

e. Peningkatan Peranan Perempuan

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan,
2. Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak,
3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan,

Misi-5:Peningkatan Pembiyaan Pembangunan dan Otonomisasi Pengembangan sumber- sumber Pendapatan Daerah

Program:

1. Program peningkatan pendapatan daerah,
2. Program peningkatan dan pengelolaan aset/kekayaan daerah,
3. Program peningkatan daya saing produksi daerah,
4. Program pengembangan ekonomi dan kerjasama daerah,
5. Program peningkatan iklim investasi, promosi dan kerjasama investasi,

Misi-6 : Pemberdayaan Masyarakat dan Penggunaan Teknologi dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat

Program:

a. Penanggulangan kemiskinan dalam Bidang Ekonomi.

1. Program pembinaan idustri kecil dan menengah (IKM),
2. Program pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin,
3. Program pengembangan infrastruktur perdesaan bagi masyarakat miskin,
4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa,
5. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,

b. Pengembangan Perdagangan

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan antar pulau,
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor antar pulau,
4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan,

c. Pembangunan UMKM dan Koperasi

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM,
2. Program pengembangan dan pendampingan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah,
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi,

d. Peningkatan Produksi Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dan Gizi

1. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perikanan),

2. Program perbaikan gizi masyarakat,
3. Program pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak,
4. Program peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,
5. Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan,
6. Program penerapan teknologi pertanian dan perikanan,
7. Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan lapangan,
8. Program Penghijauan berbasis masayarakat

e. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

1. Program pendataan digitalisasi potensi perikanan dan kelautan,
2. Program pengembangan sumberdaya perikanan kelautan,
3. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut,
4. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir,
5. Program pengembangan kawasan budidaya laut,

Misi-7: Penciptaan Lapangan Kerja

Program:

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,
2. Program peningkatan kesempatan kerja,
3. Program perlindungan ketenagakerjaan,

Misi-8: Penyelengaraan Otonomi Daerah Yang Luas Nyata dan Bertanggungjawab serta Mewujudkan Kinerja Pelayanan Pemarintahan yang terbaik, Tercepat, Terukur, Akuntabel dan Transparansi

Program:

a. Peningkatan Kualitas Aparatur.

1. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan,
3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah,
4. Program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah,
5. Program pemantapan reformasi birokrasi,
6. Program pendidikan dan pelatihan aparatur,
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur,
8. Program peningkatan system pengawasan menuju aparatur yang akuntabel

b. Pengembangan Pengkajian dan Pendataan

1. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi,
2. Program pengembangan data / informasi / statistik daerah,
3. Program pendidikan kedinasan,
4. Program pembinaan dan pengembangan aparatur,
5. Program penelitian dan pengembangan,

Misi-9: Penegakan Supremasi Hukum dan Terwujudnya Kota Tidore yang Bersih dan bebas KKN

Program:

a. Pembinaan Politik, Informasi, Komunikasi dan Media Massa.

1. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi,
2. Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi,
3. Program pendidikan politik masyarakat,
4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,
5. Program peningkatan kelompok sadar hukum,
6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa,
7. Program kerjasama informasi dengan media massa,
8. Program informasi produk hukum,

b. Pembinaan Hukum Daerah

1. Program pembentukan produk hukum dan legislasi daerah,
2. Program pembinaan hukum daerah
2. Program penataan peraturan perundang-undangan,
3. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat,
4. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan,

c. Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat.

1. Program memeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal,
2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan,
4. Program pencegahan dini dan penangulangan korban bencana alam

Misi-10: Mewujudkan Kelestarian Lingkuangn Hidup

Program:

a. Perencanaan Pembangunan, Penataan Kewilayaan, Tata Ruang dan kebersihan kota

1. Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Kota Terpadu mandiri (KTM),
2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,
3. Program Perencanaan Tata Ruang,
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Desa,
5. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan,
6. Program Survey dan Pemetaan Rawan Pangan,
7. Program perencanaan Survey dan Riset Potensi Unggulan Daerah,
8. Program Perencanaan Pencitraan Pembangunan Ekonomi Kota,
9. Program perencanaan Pembangunan Berbasis IT,
10. Program Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan,
11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan,
12. Program Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota,
13. Program Penataan Tugulufa sebagai Taman Kota,
14. Program Peningkatan PembangunanTPA,
15. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan,

b. Prasarana Jalan dan Jembatan

1. Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan,
2. Program pembangunan saluran drainase,

c. Transportasi Darat

1. Program pengelolaan sarana dan prasarana tranportasi darat,
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,
3. Program kelayakkan pengoperasian kendaraan bermotor,
4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas,

d. Transportasi Laut

1. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas penunjang dermaga/pelabuhan serta mengoptimalisasi penggunaanya,

e. Sumberdaya Air

1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan air bersih,

f. Peningkatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

1. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial,
2. Program penataan dan pengelolaan areal pemakaman,

g. Peningkatan Pariwisata Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Program pengembangan budaya dan pariwisata,
2. Program pemasaran pariwisata,
3. Program pengembanagan kemitraan pariwisata,
4. Program analisis pengembangan pariwisata da keseniaan daerah,
5. Program peningkatan pariwisata da keseniaan daerah,
6. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sumberdaya air,
7. Program pembangunan sarana dan prasarana pengairan pengendalian banjir dan pengamanan pantai,
8. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,

BAB VIII
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

8.1 Indikator Kinerja

Indikator umum adalah sejumlah indikator makro yang akan dicapai pada tahun 2010-2015, indikator ini terutama mengacu pada PP.No 6 Tahun 2008, dengan indikator hasil akhir. Tujuan Otonomi Daerah adalah peningkatan kualitas manusia yang diukur dengan indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengacu pada RPJPD Kota Tidore Kepulauan tahap-II, Tahun 2005-2025, maka target pencapaian IPM sampai akhir tahun 2025 adalah sebagi berikut :

1. Peningkatan Indeks Pendidikan,
2. Peningkatan Indeks Kesehatan,
3. Peningkatan Indeks Daya Beli,
4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68.1 atau penduduk Kota Tidore secara umum tergolong dalam kesejahteraan sedang,

Selain itu beberapa indikator makro strategis yang ingin dicapai antara lain :

1. Laju pertumbuhan ekonomi 6,00,
2. Pendapatan (PDRB) perkapita Rp.3.600.000/tahun,
3. Pengangguran terbuka 3%,

Tabel 4.1: Indikator Kinerja RPJM 2010-20015

Agenda Prioritas	Indikator Capaian	Kondisi saat ini 2010	Target RPJM 2015
Tidore Religius	Meningkatakan Pemahaman dan Pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Meningkatkan sikap toleransi antar umat beragam	Terjadinya Hubungan Kerjasama antar umat beragama	Terwujudnya solidaritas isosial antar umat beragama
Tidore Maju	***Pertumbuhan Penduduk*** a. Jumlah b. Persentasi	 94,035 1,29%	 106,962 2,17%

	Indeks Pendidikan 1.1.3 Angka melek huruf 1.1.4 Rata-rata Lama Sekolah 1.1.5 Buta huruf 1.1.6 Angka putus Sekolah	 95,61% 8,2 Thn 4,39% 3,19%	 96,60% 9 Thn 2,39% 2,5%
Tidore Adil	***Partisipasi angkatan kerja*** 1.7 Jumlah 1.8 Persentasi ***Angka Penganguran*** a. Jumlah b. Persentasi ***Penganguran terbuka*** a. Jumlah b. Persentasi	 36.132 org 64% 4,830 Org 11,25% 1,944 Org 5,38%	 41,009 org 72% 4,733 Org 8,00 % 1.250 org 3,00 %
Tidore Sejahtera	***Indeks Ekonomi*** a. Laju pertumbuhan Ekonomi b. PDRB/Kapita c. Tingkat Daya Beli d. Tingkat Laju Inflasi ***Indeks Kesehatan*** a. Angka kematian bayi b. Jumlah angka kematian bayi (perseribu) c. Angka harapan hidup	 5,89% Rp. 3,315 55,6 9,44% 4,00 % 40 bayi 64 thn	 6,00% Rp. 3,600 >55,6 9,00% 3,00 % 25 bayi 65 thn
Indeks Pembangunan Manusia		**68**	**69,70**

MATRIKS PP-MS AUTA YOUNG KEPALAUAN
2018-2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab	Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
SASARAN	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Kabupaten Kepulauan Talaud											
	Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Pelayanan Publik											
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Akuntabel	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	100 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %
		Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Inspektorat Daerah	50 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %
		Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah	Inspektorat Daerah	50 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %
Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Terhadap Layanan Dasar	Terwujudnya Rasionalisasi Jaringan Pelayanan Dasar Di Kecamatan	Rasionalisasi jaringan pelayanan dasar di Kecamatan	Sekretariat Daerah Cq. Bagian Pemerintahan	50 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %
		Pelaksanaan Pemetaan Jaringan Pelayanan Dasar Di Kecamatan	Sekretariat Daerah Cq. Bagian Pemerintahan	50 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Di Kecamatan	Pelaksanaan Pelatihan Standar Pelayanan Minimal Di Kecamatan	Sekretariat Daerah Cq. Bagian Pemerintahan	100 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %
		Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Di Kecamatan	Inspektorat Daerah	50 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Akuntabel	Pelaksanaan Pelatihan Pengelola Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Cq. Bagian Pemerintahan	100 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %
		Pelaksanaan Pelatihan Pengelola Pengaduan Publik	Sekretariat Daerah Cq. Bagian Pemerintahan	100 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %
		Pelaksanaan Pengawasan Pengelola Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	50 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %
		Pelaksanaan Pengawasan Pengelola Pengaduan Publik	Inspektorat Daerah	50 juta	25 %	0 %	50 %	0 %	75 %	0 %	100 %	0 %

Indikator Capaian Kinerja 5 Tahun	Program		Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Sekarang	Target (%)				
						2011	2012	2013	2014	2015
1	2		3	4		6	7	8	9	**10**
	Misi 2: Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya dan Adat									
		Tujuan: Teraktualisasi sinergitas pelestarian budaya lokal antar pemerintah pelaku budaya dan masyarakat								
	A	**Peningkatan Pemahaman Budaya**								
a.Meningkatnya kesadaran masyarakat dan komunitas seni budaya dalam rangka pelestarian seni budaya secara profesional dan berkesinambungan b.Terlaksananya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik c.Meningkatnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya.		1.Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya.	1.Nilai-nilai budaya lokal yang sesuai dengan kehidupan masyarakat.,	1.Teraktualisasi nilai-nilai budaya lokal yang sesuai dengan kehidupan masyarakat.	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		2.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya.	2.Meningkatkan kelompok sanggar-sanggar kesenian daerah	2.Terbentuknya sangar-sangar kesenian	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		3.Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.	3.Meningkatkan keterwakilan duta kesenian dan budaya dalam even nasional sebagai suatu eksistensi budaya lokal.	3.Terbentuknya kebersamaan sikap gotong royong pada masayarakt.	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**

Indikator Capaian Kinerja 5 Tahun	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Sekarang	Target (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4		6	7	8	9	**10**
	Misi-3 : Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat (*Live Skills*)								
	Tujuan: Mewujudkan kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan teknologi dalam rangka mendorong usaha ekonomi masyarakat								
Terbinanya kelompok-kelompok kewirausahaan yang memiliki daya saing dalam melakukan kegiatan usaha	1.Program Penguasaan Teknologi sebagai Penunjang Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat	1.Penguasaan teknologi dan keterampilan masyarakat meningkat,	1.Jumlah tingkat penguasaan teknologi dan keterampilan masyarakat meningkat,	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
	2.Program Peningkatan Pendidikan Non Formal	2.Kemampuan dan daya saing masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan melakukan kegiatan usaha,	2.Terbentuknya kemampuan dan daya saing masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan melakukan kegiatan usaha,	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
	3.Program Penguatan Kewirausahaan Pemuda	3. Meningkatnya semangat kewirausahan pemuda	3.Adanya usaha mandiri oleh pemuda	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
	4.Program Penguatan Kegiatan Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing	4. Meningkatnya penerapan teknologi dalam kegiatan ekonomi masyarakat	4. adanya usaha yang memiliki daya saing	**50%**	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	**100%**

Author/ Year/ Country	Design	Sample Size	Intervention Groups	Duration of Intervention	Results				
					Pre	Post	Pre	Post	
Mean Changes in Blood Pressure (mm Hg) and Serum Cholesterol (mg/dl) Across Studies									
Mean Changes in Blood Pressure (mm Hg) and Serum Cholesterol (mg/dl) Across Studies									
Kaur Kamlesh/ 2011/ India Effect of Yoga Nidra on Blood Pressure and Stress Level of Hypertensive Patients	**Randomized Controlled Trial** Pre Test, Post Test	60	Yoga Nidra Group Control Group	7 days (Lasted 30 minutes per day)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
2. Pilot study/ Jain Shobhana/ 2012/ India Yoga Breathing for Hypertension	Pre Test – Post Test Design	20	Yoga Breathing Group (Pranayam, Shavasana, Meditation)	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
3. Pilot study/ Sharma Ramesh/ 2008/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
4. Pilot study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Yoga Breathing for Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Breathing Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
5. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
6. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
7. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
8. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
9. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
10. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
Mean Changes in Blood Pressure (mm Hg) and Serum Cholesterol (mg/dl) Across Studies									
Mean Changes in Blood Pressure (mm Hg) and Serum Cholesterol (mg/dl) Across Studies									
Kaur Kamlesh/ 2011/ India Effect of Yoga Nidra on Blood Pressure and Stress Level of Hypertensive Patients	**Randomized Controlled Trial** Pre Test, Post Test	60	Yoga Nidra Group Control Group	7 days (Lasted 30 minutes per day)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
2. Pilot study/ Jain Shobhana/ 2012/ India Yoga Breathing for Hypertension	Pre Test – Post Test Design	20	Yoga Breathing Group (Pranayam, Shavasana, Meditation)	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
3. Pilot study/ Sharma Ramesh/ 2008/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
4. Pilot study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Yoga Breathing for Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Breathing Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
5. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
6. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
7. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
8. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
9. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	
10. Single Pilot Study/ Sharma Ramesh/ 2011/ India Effect of Yoga on Blood Pressure and Stress in Patients with Mild Hypertension	Pre Test – Post Test Design	60	Yoga Group (Pranayam, Shavasana, Meditation) Control Group	3 months (1 hour 5 days a week)	**SBP**	15.23	13.23	15.23	**DBP**
						15.23	13.23	15.23	

Subject Name	Image	Sound Image	Letter Phonics	Sound Spelling	Reading Comprehension				
Lesson Plan					**Lesson 1**	**Lesson 2**	**Lesson 3**	**Lesson 4**	**Lesson 5**
Lesson Plan Name	Tongue - Tongue - Tongue - Tongue - Tongue - Tongue - Tongue - Tongue	Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma	Pronunciation of Letter Sounds	Pronunciation of Letter Sounds	Pronunciation of Letter Sounds	Pronunciation of Letter Sounds	Pronunciation of Letter Sounds	Pronunciation of Letter Sounds	Pronunciation of Letter Sounds
Lesson Plan Duration	5 minutes				5 minutes	5 minutes	5 minutes	5 minutes	5 minutes
Speak about the Image	Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips	Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma	Pronunciation of Letter Sounds		**Mark**	Teacher	Teacher	Teacher	**Mark**
Speak about the Sound	Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips	Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma	Pronunciation of Letter Sounds		**Mark**	Teacher	Teacher	Teacher	**Mark**
Speak about the Letter	Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips	Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma	Pronunciation of Letter Sounds	Sound Spelling	**Mark**	Teacher	Teacher	Teacher	**Mark**
Speak about the Spelling	Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips	Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma	Pronunciation of Letter Sounds	Sound Spelling	**Mark**	Teacher	Teacher	Teacher	**Mark**
Speak about the Reading Comprehension	Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips, Tongue, Teeth, Lips	Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma	Pronunciation of Letter Sounds	Sound Spelling	Reading Comprehension	Reading Comprehension	Reading Comprehension	Reading Comprehension	Reading Comprehension
Lesson Plan Name					Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Lesson Plan Duration									
Lesson Plan Name									
Lesson Plan Duration									

Indikator Capaian Kinerja 5 Tahun		Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Sekarang	Target (%)				
						2011	2012	2013	2014	2015
1		2	3	4		6	7	8	9	10
Indeks Kesehatan:	**B**	**Peningkatan Kesehatan Masyarakat**								
a. **Angka Kematian Bayi** sebesar 4% ditahun 2010 menjadi 3% di tahun 2015		1.Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	1.Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Rujukan Pasien	1.Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat meningkat	**Dokter umum: 5, Spesialis: 4**	10/ 5	15/ 6	20/7	22/ 9	**Dokter umum: 25, Spesialis: 10**
b. **Jumlah Angka Kematian Bayi** (dari 1000 kelahiran) pada tahun 2010 sebanyak 40 bayi menjadi 25 bayi pada tahun 2015		2.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	2.Tercukupinya persediaan obat dan perbekalan kesehatan	2.Kualitas dan kuantitas obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi	**50,00%**	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	**100%**
c. **Angka Harapan Hidup** 64 tahun di tahun 2010 menjadi 65 tahun pada 2015		3.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3.Menurunnya penyakit	3.Presentasi penderita penyakit menurun	**Malaria: 2,357 pasien**	2.000	1.800	1.600	1.300	**Malaria: 1,150 pasien**
d. **Presentase Ibu Hamil** yang memperoleh layanan kesehatan 61,59% di tahun 2010 menjadi 75% di tahun 2015		4.Program Lingkungan Sehat dan Promosi Kesehatan.	4.Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum	4.Akses keluarga terhadap sanitasi dan air bersih	**50,00%**	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	**100%**
e.**Fasilitas Kesehatan** 30% pada tahun 2010 menjadi 70% pada tahun 2015		5.Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5.Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	5.Presentasi penerima ASKESKIN meningkat	**50,00%**	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	**100%**
f.**Sasaran vaksinasi Ibu hamil** 2280 jiwa, mendapatkan TT I 38.9% dan TT II 27,9 % di tahun 2010, meningkat menjadi 75% untuk TT I dan 65% untuk TT II di tahun 2015		6.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.	6.Meningkatnya Sarana dan Prasarana kesehatan	6.Kualitas sarana kesehatan meningkat	**Fasilitas: 74 (1 RS, 7 Puskesmas, 28 pustu, 38 polindes)**	35%	45%	55%	65%	**70% (Peningkatan)**

Author/ Year/ Country	Design	Sample Frame	Study Population	Sample Size	Sex		Age in Years		Ethnicity
					Male	Female	Mean	SD	
1. Ahmed Al-Mahrouq et al. (2021) Jordan	Cross-sectional study	Patients in Emergency Department (ED) of King Abdullah University Hospital (KAUH)	Patients in ED of KAUH	1000	52.5%	47.5%	32.5	12.75	**NR**
2. Ali et al. (2020) Saudi Arabia	Cross-sectional study	Medical students of Taif University	Medical students of Taif University	1000	1,000	1,000	1,000	1,000	**NR**
	Cross-sectional study	Medical students studied at Taif University	Medical students studied at Taif University	**Group 1**	1,000	1,000	1,000	1,000	**NR**
				Group 2	12	12	12	12	**Group 1**
				Group 3	12	12	12	12	**Group 1**
				Group 4	12	12	12	12	**Group 1**
				Group 5	12	12	12	12	**Group 1**
				Group 6	12	12	12	12	**Group 1**
				Group 7	12	12	12	12	**Group 1**
				Group 8	12	12	12	12	**Group 1**
				Group 9	12	12	12	12	**Group 1**
				Group 10	12	12	12	12	**Group 1**
	3. Bangsan Sunchai Ko Wai Ng								
3. Bangsan Sunchai Ko Wai Ng Thailand	Cross-sectional study	Medical students at Khon Kaen University	Undergraduate medical students	**200**	50	150	19.5	1.5	**NR**
	Cross-sectional study	Medical students at Khon Kaen University	Undergraduate medical students	**200**	50	150	19.5	1.5	**NR**
	Cross-sectional study	Medical students at Khon Kaen University	Undergraduate medical students	**200**	50	150	19.5	1.5	**NR**
	Cross-sectional study	Medical students at Khon Kaen University	Undergraduate medical students	**200**	50	150	19.5	1.5	**NR**
				Total	200	600	19.5	1.5	**NR**
4. Bhattacharya et al. (2020) India	**5. Bhatnagar Kavita Kaur Ray**								
	Cross-sectional study	Medical students of Government Medical College, Jammu	Undergraduate medical students	**NR**	1,110	1,110	1,110	1,110	**NR**
				Total	1,110	1,110	1,110	1,110	**NR**

Subject Name	Pages	Special Pages	Lesson Plans	Number of Periods	Weightage			
					Ist	IInd	IIIrd	Total
1. Reading and Writing Skills (Reading Comprehension, Writing Skills, Grammar and Vocabulary)	1 Reading Skills pp 1-4 2 Reading Comprehension pp 5-8	3 Paragraph Writing pp 9-12 4 Paragraph Writing pp 13-16	1 Reading Skills pp 1-4 2 Reading Comprehension pp 5-8	100	10	10	10	30
2. Grammar and Vocabulary	5 Grammar pp 17-20 6 Grammar pp 21-24	7 Grammar pp 25-28 8 Grammar pp 29-32 9 Grammar pp 33-36 10 Grammar pp 37-40 11 Grammar pp 41-44 12 Grammar pp 45-48 13 Grammar pp 49-52 14 Grammar pp 53-56 15 Grammar pp 57-60 16 Grammar pp 61-64 17 Grammar pp 65-68 18 Grammar pp 69-72 19 Grammar pp 73-76 20 Grammar pp 77-80 21 Grammar pp 81-84 22 Grammar pp 85-88 23 Grammar pp 89-92 24 Grammar pp 93-96 25 Grammar pp 97-100 26 Grammar pp 101-104 27 Grammar pp 105-108 28 Grammar pp 109-112 29 Grammar pp 113-116 30 Grammar pp 117-120 31 Grammar pp 121-124 32 Grammar pp 125-128 33 Grammar pp 129-132 34 Grammar pp 133-136 35 Grammar pp 137-140 36 Grammar pp 141-144 37 Grammar pp 145-148 38 Grammar pp 149-152 39 Grammar pp 153-156 40 Grammar pp 157-160 41 Grammar pp 161-164 42 Grammar pp 165-168 43 Grammar pp 169-172 44 Grammar pp 173-176 45 Grammar pp 177-180 46 Grammar pp 181-184 47 Grammar pp 185-188 48 Grammar pp 189-192 49 Grammar pp 193-196 50 Grammar pp 197-200	5 Grammar pp 17-20 6 Grammar pp 21-24 7 Grammar pp 25-28 8 Grammar pp 29-32 9 Grammar pp 33-36 10 Grammar pp 37-40 11 Grammar pp 41-44 12 Grammar pp 45-48 13 Grammar pp 49-52 14 Grammar pp 53-56 15 Grammar pp 57-60 16 Grammar pp 61-64 17 Grammar pp 65-68 18 Grammar pp 69-72 19 Grammar pp 73-76 20 Grammar pp 77-80 21 Grammar pp 81-84 22 Grammar pp 85-88 23 Grammar pp 89-92 24 Grammar pp 93-96 25 Grammar pp 97-100 26 Grammar pp 101-104 27 Grammar pp 105-108 28 Grammar pp 109-112 29 Grammar pp 113-116 30 Grammar pp 117-120 31 Grammar pp 121-124 32 Grammar pp 125-128 33 Grammar pp 129-132 34 Grammar pp 133-136 35 Grammar pp 137-140 36 Grammar pp 141-144 37 Grammar pp 145-148 38 Grammar pp 149-152 39 Grammar pp 153-156 40 Grammar pp 157-160 41 Grammar pp 161-164 42 Grammar pp 165-168 43 Grammar pp 169-172 44 Grammar pp 173-176 45 Grammar pp 177-180 46 Grammar pp 181-184 47 Grammar pp 185-188 48 Grammar pp 189-192 49 Grammar pp 193-196 50 Grammar pp 197-200	100	10	10	10	30
3. Comprehension of Unseen Prose Passages (Comprehension, Vocabulary, Inferences, Tone, Theme, Style, Figures of speech)	51 Prose pp 201-204 52 Prose pp 205-208 53 Prose pp 209-212 54 Prose pp 213-216 55 Prose pp 217-220 56 Prose pp 221-224 57 Prose pp 225-228 58 Prose pp 229-232 59 Prose pp 233-236 60 Prose pp 237-240 61 Prose pp 241-244 62 Prose pp 245-248 63 Prose pp 249-252 64 Prose pp 253-256 65 Prose pp 257-260 66 Prose pp 261-264 67 Prose pp 265-268 68 Prose pp 269-272 69 Prose pp 273-276 70 Prose pp 277-280 71 Prose pp 281-284 72 Prose pp 285-288 73 Prose pp 289-292 74 Prose pp 293-296 75 Prose pp 297-300	76 Prose pp 301-304 77 Prose pp 305-308 78 Prose pp 309-312 79 Prose pp 313-316 80 Prose pp 317-320 81 Prose pp 321-324 82 Prose pp 325-328 83 Prose pp 329-332 84 Prose pp 333-336 85 Prose pp 337-340 86 Prose pp 341-344 87 Prose pp 345-348 88 Prose pp 349-352 89 Prose pp 353-356 90 Prose pp 357-360 91 Prose pp 361-364 92 Prose pp 365-368 93 Prose pp 369-372 94 Prose pp 373-376 95 Prose pp 377-380 96 Prose pp 381-384 97 Prose pp 385-388 98 Prose pp 389-392 99 Prose pp 393-396 100 Prose pp 397-400	100	10	10	10	30
4. Comprehension of Unseen Poetry (Comprehension, Vocabulary, Inferences, Tone, Theme, Style, Figures of speech)	101 Poetry pp 401-404 102 Poetry pp 405-408 103 Poetry pp 409-412 104 Poetry pp 413-416 105 Poetry pp 417-420 106 Poetry pp 421-424 107 Poetry pp 425-428 108 Poetry pp 429-432 109 Poetry pp 433-436 110 Poetry pp 437-440 111 Poetry pp 441-444 112 Poetry pp 445-448 113 Poetry pp 449-452 114 Poetry pp 453-456 115 Poetry pp 457-460 116 Poetry pp 461-464 117 Poetry pp 465-468 118 Poetry pp 469-472 119 Poetry pp 473-476 120 Poetry pp 477-480	121 Poetry pp 481-484 122 Poetry pp 485-488 123 Poetry pp 489-492 124 Poetry pp 493-496 125 Poetry pp 497-500 126 Poetry pp 501-504 127 Poetry pp 505-508 128 Poetry pp 509-512 129 Poetry pp 513-516 130 Poetry pp 517-520 131 Poetry pp 521-524 132 Poetry pp 525-528 133 Poetry pp 529-532 134 Poetry pp 533-536 135 Poetry pp 537-540 136 Poetry pp 541-544 137 Poetry pp 545-548 138 Poetry pp 549-552 139 Poetry pp 553-556 140 Poetry pp 557-560	100	10	10	10	30
5. Comprehension of Unseen Passages (Comprehension, Vocabulary, Inferences, Tone, Theme, Style, Figures of speech)	141 Passage pp 561-564 142 Passage pp 565-568 143 Passage pp 569-572 144 Passage pp 573-576 145 Passage pp 577-580 146 Passage pp 581-584 147 Passage pp 585-588 148 Passage pp 589-592 149 Passage pp 593-596 150 Passage pp 597-600	151 Passage pp 601-604 152 Passage pp 605-608 153 Passage pp 609-612 154 Passage pp 613-616 155 Passage pp 617-620 156 Passage pp 621-624 157 Passage pp 625-628 158 Passage pp 629-632 159 Passage pp 633-636 160 Passage pp 637-640	161 Passage pp 641-644 162 Passage pp 645-648 163 Passage pp 649-652 164 Passage pp 653-656 165 Passage pp 657-660 166 Passage pp 661-664 167 Passage pp 665-668 168 Passage pp 669-672 169 Passage pp 673-676 170 Passage pp 677-680	100	10	10	10	30
6. Composition (Paragraph Writing, Letter Writing, Essay Writing)	171 Composition pp 681-684 172 Composition pp 685-688 173 Composition pp 689-692 174 Composition pp 693-696 175 Composition pp 697-700	176 Composition pp 701-704 177 Composition pp 705-708 178 Composition pp 709-712 179 Composition pp 713-716 180 Composition pp 717-720	181 Composition pp 721-724 182 Composition pp 725-728 183 Composition pp 729-732 184 Composition pp 733-736 185 Composition pp 737-740 186 Composition pp 741-744 187 Composition pp 745-748 188 Composition pp 749-752 189 Composition pp 753-756 190 Composition pp 757-760	100	10	10	10	30

Indikator Capaian Kinerja 5 Tahun		Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Sekarang	Target (%)				
						2011	2012	2013	2014	2015
1		2	3	4		6	7	8	9	**10**
BIDANG II	**EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM**									
	Misi 5: Peningkatan Pembiayaan Pembangunan dan Optimalisasi Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.									
		Tujuan: Mewujudkan Anggaran Pemerintahan Yang Optimal								
Indeks Ekonomi:	**A**	**Pengembangan Usaha Daerah**								
a.Laju Pertumbuhan Ekonomi ditahun 2010 sebesar 5,89% menjadi 6% pada tahun 2015		1.Program Peningkatan Pendapatan Daerah.	1 (a) Meningkatkan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel; (b) Meningkatkan sinergitas pengunaaan anggaran APBN dan APBD	1.Tercukupi pendapatan daerah untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik,	**185,5 milyar (APBD 2010)**	>5%	>5%	>5%	>5%	>5%
		2.Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset/ Kekayaan Daerah	2.Tersedia data dan informasi yang komperehensif dan akurat tentang kekayaan daerah	2.Data aset dan kekayaan daerah	**10%**	30%	50%	75%	50%	**60%**
b.PDRB perkapita di tahun 2010 Rp. 3,315 juta menjadi Rp. 3,5 juta		3.Program Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah.	3.Perkembangan sektor-sektor unggulan dalam PDRB	PDRB per kapita meningkat	**Rp. 3,315 juta**	3,35	3,37	3,4	3,45	**3,5**
c.Tingkat Invlasi pada tahun 2010 sebesar 9,44% menjadi 9% di tahun 2015		4.Program Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Daerah.	4.Meningkatnya pengembangan ekonomi dan kerjasama daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	**5,89%**	5,90%	5,93%	5,95%	5,97%	**6%**
d.Indeks Daya Beli masyarakat 55,6 di tahun 2010		5.Program Peningkatan Iklim Investasi, Kerjasama dan promosi Investasi.	5.Kemudahan bagi investor dalam hal perizinan dan penyediaan lahan investasi.	Pertumbuhan investasi meningkat	**Rp. 33,6 milyar**	>5%	>5%	>5%	>5%	>5%

Indikator Capaian Kinerja 5 Tahun		Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Sekarang	Target (%) 2011	2012	2013	2014	2015
1		2	3	4		6	7	8	9	10
	Misi-6: **Pemberdayaan Masyarakat dan Pengunaan Teknologi dalam rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat.**									
		Tujuan: Terciptanya Pemberdayaan Masyarakat dalam penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi								
	A	**Penanggulangan Kemiskinan dalam Bidang Ekonomi**								
Jumlah unit usaha pada Industri Kecil dan Menengah di tahun 2010 sebanyak 746 unit dengan pertumbuhan 443 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,497 jiwa.		1.Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1.Terbentuknya kelembagaan masyarakat pelaku ekonomi seperti koperasi, UKM dan jenis usaha lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	1.Adanya UKM yang sehat	**IKM 746 unit/ Tenaga Kerja 2,497 jiwa**	10% (820 unit/ 2,747 jiwa)	10% (746 unit/ 3,021 jiwa)	10% (821 unit/ 3,324 jiwa)	10% (746 unit/ 3656 jiwa)	**10% (IKM 821 unit/ Tenaga Kerja 4021 jiwa =(menambah 1,524 TK/ menutupi 80% pengangguran)**
		2.Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin.	2 (a)Terbentuknya kelembagaan masyarakat pelaku ekonomi seperti koperasi, UKM dan jenis usaha lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (b) adanya produk komoditi unggulan	2.Meluasnya pangsa pasar komoditi unggulan	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		3.Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan bagi Masyarakat Miskin.	3.Peningkatan infrastruktur pedesaan	3.Terpenuhinya akses masyarakat miskin	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		4.Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	4.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	4.Meningkatnya tingkat kesejahteraan	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		5.Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	5.Meningkatnya lembaga ekonomi masyarakat desa	5.Adanya lembaga ekonomi desa	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**

Author Name Journal Name	Image	Source Image	Artifact Name	Artifact Frequency	Quality Metrics				
					Sharpness	Contrast	Noise	Artifacts	Overall
A. Experimental Photographs									
Lynch et al. (2017) Journal of Forensic Sciences, 62(1), 1–8.	Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 2 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 3 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 4 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Bite Mark Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts	4 1 1 1	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0
B. Diagnostic Medical Imaging									
Kim et al. (2020) Korean Journal of Radiology, 21(1), 1–10.	Fig. 1 Chest radiographs of a 70-year-old male patient with a 2.5-cm lung nodule in the right upper lobe, which was proven to be adenocarcinoma on pathologic examination.	Chest radiograph of a 70-year-old male patient with a 2.5-cm lung nodule in the right upper lobe, which was proven to be adenocarcinoma on pathologic examination.	Photographic artifacts	1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Lynch et al. (2017) Journal of Forensic Sciences, 62(1), 1–8.	Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 2 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 3 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 4 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Bite Mark Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts	4 1 1 1	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0
C. Photographs With Artifacts									
Kim et al. (2020) Korean Journal of Radiology, 21(1), 1–10.	Fig. 1 Chest radiographs of a 70-year-old male patient with a 2.5-cm lung nodule in the right upper lobe, which was proven to be adenocarcinoma on pathologic examination.	Chest radiograph of a 70-year-old male patient with a 2.5-cm lung nodule in the right upper lobe, which was proven to be adenocarcinoma on pathologic examination.	Photographic artifacts	1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Lynch et al. (2017) Journal of Forensic Sciences, 62(1), 1–8.	Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 2 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 3 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 4 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Bite Mark Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts	4 1 1 1	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0
Kim et al. (2020) Korean Journal of Radiology, 21(1), 1–10.	Fig. 1 Chest radiographs of a 70-year-old male patient with a 2.5-cm lung nodule in the right upper lobe, which was proven to be adenocarcinoma on pathologic examination.	Chest radiograph of a 70-year-old male patient with a 2.5-cm lung nodule in the right upper lobe, which was proven to be adenocarcinoma on pathologic examination.	Photographic artifacts	1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Lynch et al. (2017) Journal of Forensic Sciences, 62(1), 1–8.	Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 2 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 3 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 4 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Bite Mark Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts	4 1 1 1	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0
Kim et al. (2020) Korean Journal of Radiology, 21(1), 1–10.	Fig. 1 Chest radiographs of a 70-year-old male patient with a 2.5-cm lung nodule in the right upper lobe, which was proven to be adenocarcinoma on pathologic examination.	Chest radiograph of a 70-year-old male patient with a 2.5-cm lung nodule in the right upper lobe, which was proven to be adenocarcinoma on pathologic examination.	Photographic artifacts	1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Lynch et al. (2017) Journal of Forensic Sciences, 62(1), 1–8.	Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 2 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 3 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 4 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Bite Mark Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts	4 1 1 1	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0
Kim et al. (2020) Korean Journal of Radiology, 21(1), 1–10.	Fig. 1 Chest radiographs of a 70-year-old male patient with a 2.5-cm lung nodule in the right upper lobe, which was proven to be adenocarcinoma on pathologic examination.	Chest radiograph of a 70-year-old male patient with a 2.5-cm lung nodule in the right upper lobe, which was proven to be adenocarcinoma on pathologic examination.	Photographic artifacts	1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Lynch et al. (2017) Journal of Forensic Sciences, 62(1), 1–8.	Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 2 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 3 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study Fig. 4 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Bite Mark Fig. 1 Photograph of the Bite Mark Evidence Used in the Case Study	Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts Photographic artifacts	4 1 1 1	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0	4.0 4.0 4.0 4.0

Учебный предмет / Учебный период	Предмет	Оценочная процедура	Дата проведения оценочной процедуры	Оценка за оценочную процедуру					
				5	4	3	2	Н	Б
Русский язык (Родной) / 1 четверть	Русский язык (Родной)	Контрольная работа по разделам Родная речь и культура речи	Учебная неделя 4 / 22.09.2025 - 26.09.2025	40	0	0	0	0	0
	Русский язык (Родной)	Диктант по теме: Звуки и буквы.	Учебная неделя 8 / 20.10.2025 - 24.10.2025	40	0	0	0	0	0
Литературное чтение (Родной) / 1 четверть	Литературное чтение (Родной)	Проверка техники чтения	Учебная неделя 7 / 13.10.2025 - 17.10.2025	40	0	0	0	0	0
	Литературное чтение (Родной)	Проверка техники чтения	Учебная неделя 9 / 27.10.2025 - 31.10.2025	40	0	0	0	0	0
Окружающий мир (Окружающий мир (Человек, природа, общество)) / 1 четверть	Окружающий мир (Окружающий мир (Человек, природа, общество))	Тест по теме: Что такое Родина?	Учебная неделя 5 / 29.09.2025 - 03.10.2025	40	0	0	0	0	0
Изобразительное искусство (Изобразительное искусство) / 1 четверть	Изобразительное искусство (Изобразительное искусство)	Рисунок на тему: Осенний лес	Учебная неделя 6 / 06.10.2025 - 10.10.2025	40	0	0	0	0	0
Технология (Технология) / 1 четверть	Технология (Технология)	Выполнение изделия по теме: Аппликация из бумаги	Учебная неделя 6 / 06.10.2025 - 10.10.2025	40	0	0	0	0	0
Физическая культура (Физическая культура) / 1 четверть	Физическая культура (Физическая культура)	Сдача нормативов по бегу	Учебная неделя 7 / 13.10.2025 - 17.10.2025	40	0	0	0	0	0
Русский язык (Родной) / 2 четверть	Русский язык (Родной)	Контрольная работа по разделам Родная речь и культура речи	Учебная неделя 14 / 17.11.2025 - 21.11.2025	40	0	0	0	0	0
	Русский язык (Родной)	Диктант по теме: Звуки и буквы.	Учебная неделя 18 / 15.12.2025 - 19.12.2025	40	0	0	0	0	0
Литературное чтение (Родной) / 2 четверть	Литературное чтение (Родной)	Проверка техники чтения	Учебная неделя 17 / 08.12.2025 - 12.12.2025	40	0	0	0	0	0
	Литературное чтение (Родной)	Проверка техники чтения	Учебная неделя 19 / 22.12.2025 - 26.12.2025	40	0	0	0	0	0
Окружающий мир (Окружающий мир (Человек, природа, общество)) / 2 четверть	Окружающий мир (Окружающий мир (Человек, природа, общество))	Тест по теме: Что такое Родина?	Учебная неделя 15 / 24.11.2025 - 28.11.2025	40	0	0	0	0	0
Изобразительное искусство (Изобразительное искусство) / 2 четверть	Изобразительное искусство (Изобразительное искусство)	Рисунок на тему: Осенний лес	Учебная неделя 16 / 01.12.2025 - 05.12.2025	40	0	0	0	0	0
Технология (Технология) / 2 четверть	Технология (Технология)	Выполнение изделия по теме: Аппликация из бумаги	Учебная неделя 16 / 01.12.2025 - 05.12.2025	40	0	0	0	0	0
Физическая культура (Физическая культура) / 2 четверть	Физическая культура (Физическая культура)	Сдача нормативов по бегу	Учебная неделя 17 / 08.12.2025 - 12.12.2025	40	0	0	0	0	0
Русский язык (Родной) / 3 четверть	Русский язык (Родной)	Контрольная работа по разделам Родная речь и культура речи	Учебная неделя 27 / 26.02.2026 - 02.03.2026	40	0	0	0	0	0
	Русский язык (Родной)	Диктант по теме: Звуки и буквы.	Учебная неделя 31 / 23.03.2026 - 27.03.2026	40	0	0	0	0	0
Литературное чтение (Родной) / 3 четверть	Литературное чтение (Родной)	Проверка техники чтения	Учебная неделя 30 / 16.03.2026 - 20.03.2026	40	0	0	0	0	0
	Литературное чтение (Родной)	Проверка техники чтения	Учебная неделя 32 / 30.03.2026 - 03.04.2026	40	0	0	0	0	0
Окружающий мир (Окружающий мир (Человек, природа, общество)) / 3 четверть	Окружающий мир (Окружающий мир (Человек, природа, общество))	Тест по теме: Что такое Родина?	Учебная неделя 28 / 05.03.2026 - 09.03.2026	40	0	0	0	0	0
Изобразительное искусство (Изобразительное искусство) / 3 четверть	Изобразительное искусство (Изобразительное искусство)	Рисунок на тему: Осенний лес	Учебная неделя 29 / 12.03.2026 - 16.03.2026	40	0	0	0	0	0
Технология (Технология) / 3 четверть	Технология (Технология)	Выполнение изделия по теме: Аппликация из бумаги	Учебная неделя 29 / 12.03.2026 - 16.03.2026	40	0	0	0	0	0
Физическая культура (Физическая культура) / 3 четверть	Физическая культура (Физическая культура)	Сдача нормативов по бегу	Учебная неделя 30 / 16.03.2026 - 20.03.2026	40	0	0	0	0	0

Author Name (Year)	Design	Sample Size	Affiliation Country	Study Quality	Results				
					OR	95% CI		OR	95% CI
Ali et al. (2020)	Prospective Cohort study	1	Pakistan	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Kaur et al. (2020)	Prospective Cohort study	1	Malaysia and Singapore	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Ko et al. (2020)	Retrospective Cohort study	1	Taiwan, Hong Kong, Mainland China and Japan	8/9 Star	13.47	3.04-59.67	11.16	1.12-111.17	11.04
	Retrospective Cohort study	1	Mainland China	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	Retrospective Cohort study	1	Mainland China	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	Retrospective Cohort study	1	Mainland China	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Wei Huang et al. (2020)	Retrospective Cohort study	1	Mainland China	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Zhang et al. (2020)	Retrospective Cohort study	1	Mainland China	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Zhao et al. (2020)	Retrospective Cohort study	1	Mainland China	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Zhou et al. (2020)	Retrospective Cohort study	1	Mainland China	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Zhu Chaoqun et al. (2020)	Retrospective Cohort study	1	Mainland China	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Zhu et al. (2020)	Retrospective Cohort study	1	Mainland China	NR	NR	NR	NR	NR	NR

Author Name	Project	Sample Size	Author Profession	Study Duration	Results			
Country/ Year					OR	CI	P	Q
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bai Yongxiang, Jiangsu Sheng, China, 2014								
Zhu Shenglong and Jiang Kunhua								
Zhu Shenglong, Yongxiang Bai, Jiangsu Sheng, China, 2014								
Ashkan Kaviani, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2015	Prevalence of Vitamin D Deficiency in Healthy Iranian Adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study	1000	Adolescent Physician	2 years	**0.87**			
	Prevalence of Vitamin D Deficiency in Healthy Iranian Adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study	1000	Adolescent Physician	2 years	**0.87**			
	Prevalence of Vitamin D Deficiency in Healthy Iranian Adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study	1000	Adolescent Physician	2 years	**0.87**	0.79	0.91	0.04
	Prevalence of Vitamin D Deficiency in Healthy Iranian Adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study	1000	Adolescent Physician	2 years	**0.87**	0.79	0.91	0.04
Ali Tinkovskii, Moscow Medical Academy, Moscow, Russia, 2014	Vitamin D Status in Healthy Children and Adolescents in Moscow	1000	Pediatrician and Endocrinologist	1 year	0.86	0.77	0.91	0.07
Fatih Tekelioglu								
Tekelioglu Fatih, Ozdemir Ozlem, Kavuncu Vural, Ozkan Ozlem, Ozdemir Nihal, Yavuz Ozlem, Cakir Nihal, Yavuz Ozlem, Cakir Nihal, 2011								

Indikator Capaian Kinerja 5 Tahun		Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Sekarang	Target (%)				
						2011	2012	2013	2014	2015
1		2	3	4		6	7	8	9	10
Bidang III	**Pemerintahan dan Aparatur**									
	Misi-8: Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab serta Mewujudkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan									
		yang Terbaik, Tercepat, Terukur, Akuntabel dan Transparansi								
		Tujuan: Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bertangungjawab dan akuntabel								
	A	**Peningkatan Kualitas Aparatur**								
a.Terbangunnya pola perencanaan dan pengelolaan data yang menunjang pembangunan kota		1.Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	1.Meningkatnya pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat	1.Jangkauan layanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
b.Tersedianya SDM aparatur yang bertanggung jawab, tepat dan berfungsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	2.Pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	2.Meratanya sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	**40%**	50%	60%	70%	80%	**90%**
		3.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.	3.Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang professional dan terukur	3.Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang professional dan terukur	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		4.Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.	4.Penyesuain jumlah kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah,	4.Jumlah kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah,	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
c.Terlaksananya reformasi birokrasi		5.Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	5.Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan ekonomi daerah dan pemerintah wilayah kecamatan dan kelurahan	a.Tingkat pelayanan publik berbasis informasi teknologi	**10%**	20%	30%	40%	50%	**60%**
				b.Integrasi jaringan sistem informasi daerah	**0%**	5%	10%	15%	20%	**25%**
		6.Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.	6.Meningkatnya etos kerja sesui tupoksi untuk menunjang pelayanan masyarakat	6.Terciptanya sistem kepegawaian yang ideal dan teruji sehingga menjamin pelaksanaan penjenjangan karir pegawai secara sehat,	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**

Indian Legal Library Class	Topic	Sub-Topic	Other Topics	Total Pages	Sub-Pages					
					Pg	Pg	Pg	Pg	Pg	Pg
	1. Original Equity Jurisdiction	1. Equity and Law of Contract	1. Equity and Law of Contract	1000	100	100	100	100	100	100
	2. Equitable Remedies	1. Specific Performance of Contract	1. Specific Performance of Contract							
		2. Injunction	2. Injunction							
		3. Rectification and Cancellation of Instruments	3. Rectification and Cancellation of Instruments							
		4. Equitable Compensation	4. Equitable Compensation							
	3. Original jurisdiction under Constitution	1. Inter-State Water Disputes	1. Inter-State Water Disputes	1000	100	100	100	100	100	100
	4. Original jurisdiction under Other Laws									
	5. Appellate Jurisdiction	1. Appeals under Constitution	1. Appeals under Constitution	1000	100	100	100	100	100	100
	6. Appellate Jurisdiction under Other Laws									
	7. Advisory Jurisdiction	1. Advisory Opinions	1. Advisory Opinions	1000	100	100	100	100	100	100
Constitution of Independent India	1. Preliminary	1. Preliminary	1. Preliminary	1000	100	100	100	100	100	100
	2. Citizenship	1. Citizenship	1. Citizenship							
	3. Fundamental Rights	1. Right to Equality	1. Right to Equality	1000	100	100	100	100	100	100
		2. Right to Freedom	2. Right to Freedom							
		3. Right against Exploitation	3. Right against Exploitation							
		4. Right to Freedom of Religion	4. Right to Freedom of Religion							
		5. Cultural and Educational Rights	5. Cultural and Educational Rights							
		6. Right to Property	6. Right to Property							
		7. Right to Constitutional Remedies	7. Right to Constitutional Remedies							
	4. Directive Principles of State Policy	1. Directive Principles of State Policy	1. Directive Principles of State Policy	1000	100	100	100	100	100	100
	5. Fundamental Duties	1. Fundamental Duties	1. Fundamental Duties	1000	100	100	100	100	100	100
	6. Union	1. The Union and its Territories	1. The Union and its Territories	1000	100	100	100	100	100	100
		2. Citizenship	2. Citizenship							
		3. Parliament	3. Parliament							
		4. Legislative Powers of the President	4. Legislative Powers of the President							
		5. Executive Government	5. Executive Government							
		6. Legislature	6. Legislature							
		7. Judiciary	7. Judiciary							
		8. Finance, Property, Contracts and Suits	8. Finance, Property, Contracts and Suits							
		9. Trade, Commerce and Intercourse	9. Trade, Commerce and Intercourse							
		10. Services	10. Services							
		11. Elections	11. Elections							
		12. Special Provisions relating to certain classes	12. Special Provisions relating to certain classes							
		13. Temporary, Transitional and Special Provisions	13. Temporary, Transitional and Special Provisions							
	7. States	1. The States	1. The States	1000	100	100	100	100	100	100
		2. Executive	2. Executive							
		3. Legislature	3. Legislature							
		4. Judiciary	4. Judiciary							
		5. Finance, Property, Contracts and Suits	5. Finance, Property, Contracts and Suits							
		6. Trade, Commerce and Intercourse	6. Trade, Commerce and Intercourse							
		7. Services	7. Services							
		8. Elections	8. Elections							
		9. Special Provisions relating to certain classes	9. Special Provisions relating to certain classes							
		10. Temporary, Transitional and Special Provisions	10. Temporary, Transitional and Special Provisions							
	8. Union and States	1. Relations between Union and States	1. Relations between Union and States	1000	100	100	100	100	100	100
		2. Trade, Commerce and Intercourse	2. Trade, Commerce and Intercourse							
		3. Finance	3. Finance							
		4. Services	4. Services							
		5. Miscellaneous	5. Miscellaneous							
	9. Emergency Provisions	1. Emergency Provisions	1. Emergency Provisions	1000	100	100	100	100	100	100
	10. Amendment	1. Amendment	1. Amendment	1000	100	100	100	100	100	100
	11. Supplementary, Transitional and Temporary Provisions	1. Supplementary, Transitional and Temporary Provisions	1. Supplementary, Transitional and Temporary Provisions	1000	100	100	100	100	100	100
	12. Schedules	1. Schedules	1. Schedules	1000	100	100	100	100	100	100
	Total			**12000**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**
Constitution of Independent India Amendments	**1. 1st Amendment Act, 1951 - Constitution (First Amendment) Act, 1951**									
	2. 2nd Amendment Act, 1952 - Constitution (Second Amendment) Act, 1952									
	3. 3rd Amendment Act, 1954 - Constitution (Third Amendment) Act, 1954									
	4. 4th Amendment Act, 1955 - Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955									
	5. 5th Amendment Act, 1955 - Constitution (Fifth Amendment) Act, 1955									
	6. 6th Amendment Act, 1956 - Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956									
	7. 7th Amendment Act, 1956 - Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956									
	8. 8th Amendment Act, 1960 - Constitution (Eighth Amendment) Act, 1960									
	9. 9th Amendment Act, 1960 - Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960									
	10. 10th Amendment Act, 1961 - Constitution (Tenth Amendment) Act, 1961									
	11. 11th Amendment Act, 1961 - Constitution (Eleventh Amendment) Act, 1961									
	12. 12th Amendment Act, 1962 - Constitution (Twelfth Amendment) Act, 1962									
	13. 13th Amendment Act, 1962 - Constitution (Thirteenth Amendment) Act, 1962									
	14. 14th Amendment Act, 1962 - Constitution (Fourteenth Amendment) Act, 1962									
	15. 15th Amendment Act, 1963 - Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963									
	16. 16th Amendment Act, 1963 - Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963									
	17. 17th Amendment Act, 1964 - Constitution (Seventeenth Amendment) Act, 1964									
	18. 18th Amendment Act, 1966 - Constitution (Eighteenth Amendment) Act, 1966									
	19. 19th Amendment Act, 1966 - Constitution (Nineteenth Amendment) Act, 1966									
	20. 20th Amendment Act, 1966 - Constitution (Twenty Second Amendment) Act, 1966									
	21. 21st Amendment Act, 1967 - Constitution (Twenty First Amendment) Act, 1967									
	22. 22nd Amendment Act, 1969 - Constitution (Twenty Second Amendment) Act, 1969									
	23. 23rd Amendment Act, 1969 - Constitution (Twenty Third Amendment) Act, 1969									
	24. 24th Amendment Act, 1971 - Constitution (Twenty Fourth Amendment) Act, 1971									
	25. 25th Amendment Act, 1971 - Constitution (Twenty Fifth Amendment) Act, 1971									
	26. 26th Amendment Act, 1971 - Constitution (Twenty Sixth Amendment) Act, 1971									
	27. 27th Amendment Act, 1971 - Constitution (Twenty Seventh Amendment) Act, 1971									
	28. 28th Amendment Act, 1972 - Constitution (Twenty Eighth Amendment) Act, 1972									
	29. 29th Amendment Act, 1972 - Constitution (Twenty Ninth Amendment) Act, 1972									
	30. 30th Amendment Act, 1972 - Constitution (Thirtieth Amendment) Act, 1972									
	31. 31st Amendment Act, 1973 - Constitution (Thirty First Amendment) Act, 1973									
	32. 32nd Amendment Act, 1973 - Constitution (Thirty Second Amendment) Act, 1973									
	33. 33rd Amendment Act, 1974 - Constitution (Thirty Third Amendment) Act, 1974									
	34. 34th Amendment Act, 1974 - Constitution (Thirty Fourth Amendment) Act, 1974									
	35. 35th Amendment Act, 1974 - Constitution (Thirty Fifth Amendment) Act, 1974									
	36. 36th Amendment Act, 1975 - Constitution (Thirty Sixth Amendment) Act, 1975									
	37. 37th Amendment Act, 1975 - Constitution (Thirty Seventh Amendment) Act, 1975									
	38. 38th Amendment Act, 1975 - Constitution (Thirty Eighth Amendment) Act, 1975									
	39. 39th Amendment Act, 1975 - Constitution (Thirty Ninth Amendment) Act, 1975									
	40. 40th Amendment Act, 1976 - Constitution (Fortieth Amendment) Act, 1976									
	41. 41st Amendment Act, 1976 - Constitution (Forty First Amendment) Act, 1976									
	42. 42nd Amendment Act, 1976 - Constitution (Forty Second Amendment) Act, 1976									
	43. 43rd Amendment Act, 1977 - Constitution (Forty Third Amendment) Act, 1977									
	44. 44th Amendment Act, 1978 - Constitution (Forty Fourth Amendment) Act, 1978									
	45. 45th Amendment Act, 1980 - Constitution (Forty Fifth Amendment) Act, 1980									
	46. 46th Amendment Act, 1982 - Constitution (Forty Sixth Amendment) Act, 1982									
	47. 47th Amendment Act, 1984 - Constitution (Forty Seventh Amendment) Act, 1984									
	48. 48th Amendment Act, 1984 - Constitution (Forty Eighth Amendment) Act, 1984									
	49. 49th Amendment Act, 1984 - Constitution (Forty Ninth Amendment) Act, 1984									
	50. 50th Amendment Act, 1984 - Constitution (Fifty Amendment) Act, 1984									
	51. 51st Amendment Act, 1985 - Constitution (Fifty First Amendment) Act, 1985									
	52. 52nd Amendment Act, 1985 - Constitution (Fifty Second Amendment) Act, 1985									
	53. 53rd Amendment Act, 1986 - Constitution (Fifty Third Amendment) Act, 1986									
	54. 54th Amendment Act, 1986 - Constitution (Fifty Fourth Amendment) Act, 1986									
	55. 55th Amendment Act, 1986 - Constitution (Fifty Fifth Amendment) Act, 1986									
	56. 56th Amendment Act, 1987 - Constitution (Fifty Sixth Amendment) Act, 1987									
	57. 57th Amendment Act, 1987 - Constitution (Fifty Seventh Amendment) Act, 1987									
	58. 58th Amendment Act, 1987 - Constitution (Fifty Eighth Amendment) Act, 1987									
	59. 59th Amendment Act, 1988 - Constitution (Fifty Ninth Amendment) Act, 1988									
	60. 60th Amendment Act, 1988 - Constitution (Sixtieth Amendment) Act, 1988									
	61. 61st Amendment Act, 1989 - Constitution (Sixty First Amendment) Act, 1989									
	62. 62nd Amendment Act, 1989 - Constitution (Sixty Second Amendment) Act, 1989									
	63. 63rd Amendment Act, 1989 - Constitution (Sixty Third Amendment) Act, 1989									
	64. 64th Amendment Act, 1990 - Constitution (Sixty Fourth Amendment) Act, 1990									
	65. 65th Amendment Act, 1990 - Constitution (Sixty Fifth Amendment) Act, 1990									
	66. 66th Amendment Act, 1990 - Constitution (Sixty Sixth Amendment) Act, 1990									
	67. 67th Amendment Act, 1990 - Constitution (Sixty Seventh Amendment) Act, 1990									
	68. 68th Amendment Act, 1991 - Constitution (Sixty Eighth Amendment) Act, 1991									
	69. 69th Amendment Act, 1991 - Constitution (Sixty Ninth Amendment) Act, 1991									
	70. 70th Amendment Act, 1992 - Constitution (Seventieth Amendment) Act, 1992									
	71. 71st Amendment Act, 1992 - Constitution (Seventy First Amendment) Act, 1992									
	72. 72nd Amendment Act, 1992 - Constitution (Seventy Second Amendment) Act, 1992									
	73. 73rd Amendment Act, 1992 - Constitution (Seventy Third Amendment) Act, 1992									
	74. 74th Amendment Act, 1992 - Constitution (Seventy Fourth Amendment) Act, 1992									
	75. 75th Amendment Act, 1993 - Constitution (Seventy Fifth Amendment) Act, 1993									
	76. 76th Amendment Act, 1994 - Constitution (Seventy Sixth Amendment) Act, 1994									
	77. 77th Amendment Act, 1995 - Constitution (Seventy Seventh Amendment) Act, 1995									
	78. 78th Amendment Act, 1995 - Constitution (Seventy Eighth Amendment) Act, 1995									
	79. 79th Amendment Act, 1995 - Constitution (Seventy Ninth Amendment) Act, 1995									
	80. 80th Amendment Act, 2000 - Constitution (Eighty Amendment) Act, 2000									
	81. 81st Amendment Act, 2000 - Constitution (Eighty First Amendment) Act, 2000									
	82. 82nd Amendment Act, 2000 - Constitution (Eighty Second Amendment) Act, 2000									
	83. 83rd Amendment Act, 2000 - Constitution (Eighty Third Amendment) Act, 2000									
	84. 84th Amendment Act, 2001 - Constitution (Eighty Fourth Amendment) Act, 2001									
	85. 85th Amendment Act, 2001 - Constitution (Eighty Fifth Amendment) Act, 2001									
	86. 86th Amendment Act, 2002 - Constitution (Eighty Sixth Amendment) Act, 2002									
	87. 87th Amendment Act, 2003 - Constitution (Eighty Seventh Amendment) Act, 2003									
	88. 88th Amendment Act, 2003 - Constitution (Eighty Eighth Amendment) Act, 2003									
	89. 89th Amendment Act, 2003 - Constitution (Eighty Ninth Amendment) Act, 2003									
	90. 90th Amendment Act, 2003 - Constitution (Ninetieth Amendment) Act, 2003									
	91. 91st Amendment Act, 2003 - Constitution (Ninety First Amendment) Act, 2003									
	92. 92nd Amendment Act, 2003 - Constitution (Ninety Second Amendment) Act, 2003									
	93. 93rd Amendment Act, 2005 - Constitution (Ninety Third Amendment) Act, 2005									
	94. 94th Amendment Act, 2006 - Constitution (Ninety Fourth Amendment) Act, 2006									
	95. 95th Amendment Act, 2009 - Constitution (Ninety Fifth Amendment) Act, 2009									
	96. 96th Amendment Act, 2011 - Constitution (Ninety Sixth Amendment) Act, 2011									
	97. 97th Amendment Act, 2011 - Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011									
	98. 98th Amendment Act, 2012 - Constitution (Ninety Eighth Amendment) Act, 2012									
	99. 99th Amendment Act, 2014 - Constitution (Ninety Ninth Amendment) Act, 2014									
	100. 100th Amendment Act, 2015 - Constitution (Hundred Amendment) Act, 2015									
	101. 101st Amendment Act, 2016 - Constitution (Hundred First Amendment) Act, 2016									
	102. 102nd Amendment Act, 2018 - Constitution (Hundred Second Amendment) Act, 2018									
	103. 103rd Amendment Act, 2019 - Constitution (Hundred Third Amendment) Act, 2019									
	104. 104th Amendment Act, 2020 - Constitution (Hundred Fourth Amendment) Act, 2020									
	105. 105th Amendment Act, 2021 - Constitution (Hundred Fifth Amendment) Act, 2021									
	106. 106th Amendment Act, 2023 - Constitution (Hundred Sixth Amendment) Act, 2023									
	107. 107th Amendment Act, 2024 - Constitution (Hundred Seventh Amendment) Act, 2024									
	108. 108th Amendment Act, 2026 - Constitution (Hundred Eighth Amendment) Act, 2026									
	Total			**12000**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**

Indikator Capaian Kinerja 5 Tahun	Program		Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Sekarang	Target (%)				
						2011	2012	2013	2014	2015
1	2		3	4		6	7	8	9	10
		4.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	4.Memantapkan fungsi dewan perwakilan daerah	4.Terbentuknya sinergitas pemerintah dalam pembangunan	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		5.Program Peningkatan Kelompok Sadar Hukum	5.Terwujudnya kehidupan masyarakat yang taat hukum	5.Terbentuknya kelompok-kelompok sadar hukum di setiap kecamatan dan desa	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		6.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.	6.Meningkatnya transparansi pengelolaan pemerintahan	6.Tertanganinya kasus-kasus penyelewengan jabatan	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		7.Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.	7.Meningkatnya ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan stabilitas keamanan daerah	7.Tersedia produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk menunjang pembangunan daerah.	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		8.Program Sosialisasi Produk Hukum	8.Meningkatkan Tersosialisasinya produk hukum daerah	8.Tersosialisasinya produk hukum	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
	B	**Pembinaan Hukum**								
a.Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat dalam penetapan produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		1.Program Pembentukan Produk Hukum dan Legislasi Daerah	1.Meningkatnya kualitas produk hukum dan legislasi daerah	1.Adanya naskah akademik pada setiap produk hukum	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		2. Program pembinaan hukum daerah	2. Terwjudnya hukum daerah	2. Tersosialisasinya produk hukum daerah dan nasional	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		3.Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	3.Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	3.Tersedianya dokumen peraturan daerah	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
b.Terwujudnya peneegakan hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan serta semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi		4.Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.	4.Meningkatnya laporan pelanggaran hukum yang tertangani	4.Penyelesaian pelanggaran hukum	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		4.Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.	4.Meningkatnya penataan pertanahan	4.Menurunnya konflik pertanahan	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**

Indikator Capaian Kinerja 5 Tahun		Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Sekarang	Target (%)				
						2011	2012	2013	2014	2015
1		2	3	4		6	7	8	9	**10**
	C	**Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Masyarakat.**								
Gangguang Keamanan sebesar 211 di tahun 2010 menjadi 150 di tahun 2015		1.Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.	1.Menurunnya angka gangguang kemanan dan ketertiban	1.Ratio angka kriminalitas berkurang (1:10.000 penduduk)	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		2.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	2.Meningkatnya kenyamanan lingkungan	3.Timbulnya rasa aman	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		3.Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.	3.Meningkatnya pembinaan ketertiban dan keamanan lingkungan	3.Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		4.Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	4.Meningkatnya pembinaan pencegahan bencana alam	4.Pemahaman masyarakat terhadap bencana alam	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**

Subject Area Learning Outcomes	Topics	Special Needs	Lesson Hours	Grade Levels				
				9	10	11	12	
				A	A	A	A	
Unit 3	**Interactions of Individuals Over Time** **Why Do Societies Change and Stay the Same?** **Why Do Societies Change and Stay the Same?**							
	Students will be able to analyze and evaluate the ways in which societies change and stay the same.							
	Students will be able to:							
	Analyze the Relationship Between Technology and Society in Different Eras							
	Analyze the impact of technological innovations on society, culture, and the environment.	Technology and Society Technological Innovation Industrialization Urbanization Modernization Impact on Society Impact on Culture Impact on the Environment Ethical Implications Unintended Consequences Technological Determinism Social Shaping of Technology Digital Divide Cultural Adaptation Resistance to Change Case Studies Industrial Revolution Information Revolution Digital Revolution Artificial Intelligence Automation Social Media Internet Smartphones Environmental Impact Ethical Dilemmas Future Trends	360	72	72	72	72	72
	Evaluate how technology has shaped social interactions, relationships, and communication patterns.		360	72	72	72	72	72
	Analyze the role of technology in addressing or exacerbating social inequalities and challenges.		360	72	72	72	72	72
	Evaluate the ethical implications of technological innovations and their impact on society and the environment.		360	72	72	72	72	72
	Analyze the role of technology in shaping cultural identities and practices.		360	72	72	72	72	72
	Evaluate the potential for technology to promote or hinder social change and progress.		360	72	72	72	72	72
	Analyze the Impact of Globalization on Society and Culture							
	Analyze the economic, social, and cultural impacts of globalization on different regions and communities.	Globalization Economic Globalization Cultural Globalization Political Globalization Technological Globalization Impact on Economies Impact on Culture Impact on Identity Impact on Environment Cultural Homogenization Cultural Hybridization Resistance to Globalization Case Studies Multinational Corporations Global Supply Chains Outsourcing Offshoring Digital Globalization Social Media Internet Global Migration Cultural Exchange Ethical Implications Future Trends	360	72	72	72	72	72
	Evaluate the role of technology in facilitating or hindering cultural exchange and understanding.		360	72	72	72	72	72
	Analyze the ethical implications of globalization, including issues of exploitation, inequality, and cultural appropriation.		360	72	72	72	72	72
	Evaluate the potential for globalization to promote or hinder social change and progress.		360	72	72	72	72	72
	Analyze the Impact of Migration							
	Analyze the causes and consequences of migration, including economic, political, and environmental factors.	Migration Push Factors Pull Factors Economic Migration Political Migration Environmental Migration Refugees Asylum Seekers Immigration Emigration Diaspora Brain Drain Remittances Cultural Adaptation Assimilation Multiculturalism Xenophobia Discrimination Human Rights Case Studies Global Migration Patterns Impact on Sending Countries Impact on Receiving Countries Ethical Implications Future Trends	360	72	72	72	72	72
	Evaluate the impact of migration on both sending and receiving countries, including economic, social, and cultural impacts.		360	72	72	72	72	72
	Analyze the ethical implications of migration, including issues of human rights, discrimination, and exploitation.		360	72	72	72	72	72
	Evaluate the potential for migration to promote or hinder social change and progress.		360	72	72	72	72	72
	Analyze the Role of Media							
	Analyze the impact of different forms of media (e.g., social media, traditional media, digital media) on society, culture, and individuals.	Media Mass Media Social Media Digital Media Traditional Media Impact on Society Impact on Culture Impact on Individuals Misinformation Disinformation Propaganda Echo Chambers Filter Bubbles Algorithms Data Privacy Surveillance Cyberbullying Online Harassment Digital Literacy Media Literacy Ethical Implications Case Studies Future Trends	360	72	72	72	72	72
	Evaluate the ethical implications of media, including issues of bias, misinformation, and privacy.		360	72	72	72	72	72
	Analyze the potential for media to promote or hinder social change and progress.		360	72	72	72	72	72
	Analyze the Impact of Conflict and Cooperation							
	Analyze the causes and consequences of conflict and cooperation, including economic, political, and social factors.	Conflict War Peace Cooperation Diplomacy Negotiation Mediation Arbitration Treaties Alliances International Organizations Peacekeeping Conflict Resolution Peace Building Human Rights Refugees Displacement Terrorism Cyberwarfare Economic Sanctions Trade Wars Resource Scarcity Climate Change Ethnic Conflict Religious Conflict Ideological Conflict Case Studies Future Trends	360	72	72	72	72	72
	Evaluate the effectiveness of different conflict resolution mechanisms, including diplomacy, negotiation, and peacekeeping.		360	72	72	72	72	72
	Analyze the ethical implications of conflict and cooperation, including issues of human rights, discrimination, and exploitation.		360	72	72	72	72	72
	Evaluate the potential for conflict and cooperation to promote or hinder social change and progress.		360	72	72	72	72	72

Indikator Capaian Kinerja 5 Tahun	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Sekarang	Target (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4		6	7	8	9	**10**
c.Terbentuknya jaringan drainase primer kota, interaksi per wilayah menjadi 50% sistem drainase kota terpadu									
	C Transportasi Darat								
Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dari 53 kasus di tahun 2010 menjadi 20 kasus di tahun 2015	1.Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tranportasi Darat.	1.Meningkatnya pengelolaan saranan dan prasarana	1.Adanya trayek khusus	**25%**	30	35	40	45	**50%**
	2.Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	2.Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengendara	2.Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengendara	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
	3.Program Kelayaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	3.Tertatanya kelayakan kendaraan bermotor	3.Penertiban kendaraan bermotor	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
	4.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4.Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	4.Tingkat kecelakaan lalu lintas menurun	**53 kasus**	50	45	30	25	**20 kasus**
	D Transportasi Laut								
a.Peningkatan rehabilitas dan pemeliharaan pelabuhan laut	1.Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Dermaga/ Pelabuhan serta mengotimalisasi pengunaanya	1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas dermaga serta kemudaan akses	1.Kenyamanan dan kelancaran transportasi laut	**30%**	40%	45%	50%	55%	**60%**
b.Meningkatnya jumlah barang yang dibongkar pada tahun 2010 sebanyak 20,045 ton menjadi 25,000 ton (25%) di tahun 2015									

Indikator Capaian Kinerja 5 Tahun	Program		Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Sekarang	Target (%)				
						2011	2012	2013	2014	2015
1	2		3	4		6	7	8	9	**10**
	E	**Sumberdaya Air**								
a.75% penduduk dilayani air bersih dengan rata-rata pengaliran air 120 liter/org/hari dengan pengaliran kontinyu 24 jam b.50% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu		1.Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan air bersih.	1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan jaringan air bersih	1.Terpenuhinya kebutuhan air bersih	**25%**	35%	45%	55%	65%	**75%**
	F	**Peningkatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman**								
Terciptanya lingkungan taman kota yang bersih, sehat dan efisien bagi masyarakat		1.Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	1.Terlaksananya perbaikan perumahan akibat bencana	1.Kerusakan perumahan akibat bencana tertanggulangi	**100%**	100%	100%	100%	100%	**100%**
			2							
		2.Program Pengelolaan Areal Pemakaman.	2.Tersedianya areal pemakaman yang memadai	2.Lokasi pemakaman yang tetap	**100%**	100%	100%	100%	100%	**100%**
	G	**Peningkatan Pariwisata Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**								
Meningkatnya jumlah pengunjung yang menginap di tahun 2010 sebesar 410 orang menjadi 2000 orang (41%) di tahun 2015		1.Program Pengembangan Budaya dan Pariwisata	1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas daerah pariwisata	1. Tersedianya sarana infrastruktur pariwisata	**25%**	35%	45%	55%	65%	**75%**
			1. Meningkanya sarana infrastruktur pariwisata	1. Tertatanya ruang kawasan pendukung						
			1. Optimalisasi penataan ruang sebagai kawasan pendukung sektor							
		2. Program Pemasaran Pariwisata.	2. Meningkatnya promosi pariwisata yang efektif dengan beragam	2. Adanya pendukung promosi pariwisata	**25%**	35%	45%	55%	65%	**75%**
			2. Tersedianya website pariwisata	Terciptanya media informasi pariwisata dan						
			2. Terselengarnya event-event pariwisata yang bertaraf lokal maupun	2.Meningkatnya jumlah wisatawan						
		3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3. Meningkatnya peluang investasi pariwisata dan agen budaya	1. Adanya investor pariwisata dan agen	**25%**	35%	45%	55%	65%	**75%**
			3. Mengoptimalisasi sistim informasi pariwisata sebagai media promosi	3. Tersosialiasinya kawasan pariwisata						
		4. Program analisis pengembangan pariwisata dan Kesenian Daerah	4. Menigkatnya penelitian dan pengembangan kepariwisataan	4. Dokumen master plan atau RIPPDA	**25%**	35%	45%	55%	65%	**75%**
			4. Tersedianya naskah RTIPPDA Kota Tidore Kepulauan yang *up to date*							
		5. Program Peningkatan pariwisata dan Kesenian Daerah	5. Meningkatnya kemampuan dan hospitality para pekerja wisata	5. Meningkatnya skill pemandu wisata.	**25%**	35%	45%	55%	65%	**75%**
			5. Meningkatnya sangar-sangar budaya dan seni	5. Adanya sanggar budaya dan seni						
		2.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumberdaya Air	2.Pemeliharaan sumber daya air	2.Tersedianya sumber daya air bersih	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
		3.Program Pembangunan Sarana Prasarana Pengairan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.	3.Pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai	3.Banjir dan abrasi pantai tertangani	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**
(lihat penjelasan lain di Misi-10 bagian B dan D)		4.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	4.Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan	4.Kualitas lingkungan terjaga	**50%**	60%	70%	80%	90%	**100%**